



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



**Mudik Aman
Berkesan**

**Selāmāt Hari Rāyā
Idul Fitri 2023/ 1444H
Mohon Māāf
Lāhīr Bāṭīn**



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

INFO KHUSUS

**Cek Jalur
Mudik
Persiapan
Lebaran**



**DUKUNGAN
SUBSIDI
ANGKUTAN
PERINTIS**



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Kegiatan pengecekan jalur pansela ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa jalur pansela dapat digunakan sebagai jalur alternatif ketika jalan tol atau jalur pantura mengalami kepadatan.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR Akhmad Cahyadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana bersama pejabat terkait lainnya ketika memberikan keterangan kepada media, di sela kegiatan pengecekan Jalur Pantai Selatan, Sindangbarang, Cianjur, 19/1/2023. Foto: HMS DJPD/CAS



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Hal-hal yang harus disiapkan pengemudi sebelum berpergian keluar kota:

Mempersiapkan surat-surat penting (KTP, SIM, dan STNK)



Mempersiapkan fisik kendaraan. Dari mesin, ban, rem hingga perlengkapan darurat.



Mempersiapkan fisik pengemudi. Pengemudi harus dalam keadaan sehat dan siap berkendara.



Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Berjumpa kembali melalui *Newsletter* infoHUBDAT sebagai sarana menjalin tali silaturahmi dan berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, dengan harapan dapat menjadi motivasi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.

Pembaca yang budiman, konektivitas antarwilayah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, terlebih di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan angkutan perintis, baik angkutan jalan perintis, angkutan barang, maupun penyeberangan perintis.

Selain itu saat ini kita juga disibukkan dengan persiapan menjelang hajat besar Kementerian Perhubungan yaitu Angkutan Lebaran 2023/1444 H. Berbagai langkah persiapan telah dilakukan, antara lain pengecekan jalur pantai selatan, jalur tengah, dan jalur tol trans Jawa. Dalam pelaksanaannya Ditjen Perhubungan Darat melibatkan instansi terkait seperti Korlantas Polri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jasa Raharja, serta pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menemukenali kesiapan infrastruktur jalan menjelang periode Angkutan Lebaran.

Dari sisi kesiapan sarana juga telah dilakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan bermotor atau *rampcheck*. Kegiatan ini menasar Angkutan Umum baik Angkutan AKAP, AKDP dan Pariwisata. Rampcheck Angkutan Umum telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Dishub Provinsi/Kabupaten/Kota dan BPTD yang dilaksanakan di Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Pool Bus Pariwisata di seluruh Indonesia.

Menjelang penyelenggaraan Angkutan Lebaran ini, pemerintah menetapkan kebijakan penting, yaitu penambahan cuti bersama pada periode sebelum Lebaran, dan menggeser tanggal masuk kerja usai lebaran. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan potensi lonjakan pemudik yang diprediksikan meningkat dari 85 juta orang pemudik pada tahun lalu, menjadi 123 juta orang yang akan mudik tahun ini. Masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan sebelum puncak arus mudik sehingga dapat terhindar dari kemacetan yang tidak perlu.

Pada kesempatan ini, saya pribadi dan juga mewakili institusi, dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2023 / 1444H, mohon maaf lahir batin. Selamat pulang kampung, pulang kampung harus selamat.

Akhir kata, saya sampaikan imbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DRS. HENDRO SUGIATNO, M.M.





Foto Cover:
BPTD XXV Papua-Papua Barat/Vicran Supusepa
Seorang warga Kabupaten Mimika berjalan kaki di tengah banjir, dengan latar bus DAMRI Perintis, 3/7/2021. Bus rute Timika-Mioko tersebut berhenti di titik terakhir di jalan menuju ke Kampung Mioko, Mimika, Papua. Layanan Angkutan Jalan Perintis sangat dibutuhkan masyarakat hingga ke pedalaman Papua.

PENANGGUNG JAWAB
Amirulloh

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Aznal

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Dinda Siahaan
Alvia Lilian
Hanna Suryadika

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI
M. Aulia Dharna
Herman Wibowo
Bayu Adi Saputro
Rinjani Pangestu

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Syaka Aprilida
Bambang Widianto
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Nolita
Rusdinal
M. Farid Ardiansyah
M. Fadil Imaddudin
Achmad Maulana
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Reza Saputra
Nurfadilah Sinta Ningrum
Ade Yunita
Ardianto
Rina Noviana
Septriana Dia Areta
Virsa Rosadya

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Erlieka Affan
Ririn Scorviyanti
Rinto Mahendra Raharjo



Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Gedung Karya Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Pada akhir tahun lalu, pemerintah secara resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah Presiden Joko Widodo mengumumkannya melalui konferensi pers di istana negara, Jakarta. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali serta kajian mendalam. Hal ini turut mempengaruhi volume mobilitas masyarakat terlebih menjelang hajat besar angkutan lebaran.

Para pembaca yang budiman, pada edisi triwulan pertama kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menyuguhkan Laporan Utama mengenai Optimalisasi Pelayanan Angkutan Perintis. Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat menyiapkan anggaran sebanyak Rp 774 Milyar untuk subsidi keperintisan transportasi darat.

Kemudian, kami sajikan pula liputan khusus mengenai kinerja serta kondisi sarana dan prasarana di wilayah kerja BPTD XVII Kaltim - Kaltara. Unit kerja ini memiliki wilayah kerja yang cukup luas meliputi 2 provinsi. Tim liputan tiba di perbatasan RI - Malaysia di pulau Sebatik setelah menempuh perjalanan dengan kapal ferry rute Tarakan - Nunukan - Sebatik.

Tak kalah menarik, artikel mengenai Dukungan Ditjen Perhubungan Darat pada FIH2O di Danau Toba. Dukungan tersebut antara lain berupa penyediaan *shuttle* bus selama acara berlangsung, sarana prasarana penyeberangan di Danau Toba serta manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengatur lalu lintas truk kontainer dari Pelabuhan Belawan menuju kawasan Danau Toba.

Kami tampilkan pula tulisan tentang Wajah Angkutan Perkotaan dengan Skema *Buy The Service*. Serta ulasan mengenai peresmian pengoperasian Angkutan Lintas Batas Negara RI - Timor Leste, rute Kupang - Dili.

Selain itu, kami tampilkan pula sejumlah artikel mengenai persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran seperti pengecekan jalur mudik oleh intansi terkait, pengawasan kelaikan kendaraan bus, serta masyarakat yang antusias mengikuti program mudik gratis Ditjen Perhubungan Darat.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian.*



daftar isi
EDISI TRIWULAN 01 / 2023

Angkutan Penyeberangan Perintis yang dilayani oleh KMP Manta II menjadi andalan masyarakat Tarakan, Nunukan dan Pulau Sebatik untuk melakukan perjalanan antar pulau dengan biaya terjangkau.

Kendaraan dan penumpang pejalan kaki sedang melintasi rampdoor KMP Manta II di Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Nunukan, Kalimantan Utara, 8/3/2023. Foto: HMS DJPD/WBW



06 Dukungan Subsidi Angkutan Perintis

Ditjen Perhubungan Darat menyiapkan anggaran sebanyak Rp774 M untuk subsidi keperintisan transportasi darat.

Info Utama

04

OPTIMALISASI PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS

Dengan adanya subsidi perintis penumpang, tarif yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih terjangkau, karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan pemerintah.



Info Khusus

08 BPTD XVII Kaltim-Kaltara, Kelola Mobilitas Rajut Konektivitas

10 Angkutan Penyeberangan Perintis Tarakan-Nunukan-Sebatik

12 Angkutan Jalan Perintis Digemari, Ekonomis dan Berbuah Manis

14 Dukungan Ditjen Hubdat Pada FIH2O di Danau Toba

Info Angkutan

16 Wajah Angkutan Perkotaan dengan Skema Buy The Service

20 Kemenhub Terus Dorong Masyarakat Gunakan Angkutan Umum

22 Angkutan Lintas Batas Negara Kupang-Dili Resmi Beroperasi

38 Masyarakat Antusias Daftar Mudik Gratis Ditjen Hubdat

Info Sarana

24 Kendaraan Listrik, Kearifan Lokal Bertransportasi Masyarakat Asmat

25 Pengawasan Bus Jelang Angkutan Lebaran Pastikan Laik Jalan

28 Apresiasi Pusat Bagi UPUBKB Terakreditasi A

Info Prasarana

30 Presiden RI Resmikan Dua Terminal Tipe A di Sumatera Utara

32 Kolaborasi Antar Instansi Optimalkan Penanganan Kendaraan ODOL

Info Lalu Lintas

34 Cek Jalur Mudik Persiapan Lebaran

Info Selintas

- 39**
- Bahas Transportasi Cerdas, Ditjen Hubdat Gelar Webinar *Sharing Session*
 - Pembangunan Infrastruktur Transportasi Di Aceh Pacu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Wisata
 - Kemenhub Bahas Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dengan KSP
 - Gelar Pembekalan Satker, Ditjen Hubdat Evaluasi Anggaran 2022 dan Bahas Pelaksanaan Anggaran 2023
 - Pergerakan Masyarakat Selama Lebaran 2023 Diprediksi Meningkat Kemenhub Siapkan Langkah Antisipasi
 - Layanan Samsat Hadir Di Terminal Tipe A Leuwipanjang Bandung

Lensa Hubdat

- 43**
- Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

OPTIMALISASI PELAYANAN ANGKUTAN PERINTIS

Dengan adanya subsidi perintis penumpang, tarif yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih terjangkau, karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan pemerintah.

Alokasi anggaran angkutan perintis pada 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan adanya kenaikan ini, Kementerian Perhubungan berupaya mengoptimalkan pelayanan transportasi baik di darat, laut, udara, serta kereta api, yang menjangkau hingga ke pelosok daerah.

Pada 2023, alokasi anggaran subsidi perintis di semua moda transportasi sebesar Rp. 3,51 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 2022 sebesar Rp. 3,01 triliun. Adapun rinciannya per moda transportasi yakni: transportasi darat Rp. 1,32 triliun, transportasi laut Rp. 1,47 triliun, transportasi udara Rp. 550,1 miliar, serta perkeretaapian Rp. 175,9 miliar.

Jumlah tersebut belum termasuk subsidi *Public Service Obligation* (PSO) atau kewajiban pelayanan publik 2023 yang ada pada sektor perkeretaapian sebesar Rp. 2,54 triliun dan pada sektor perhubungan laut sebesar Rp. 2,39 triliun.

“Pemberian subsidi angkutan perintis ini diberikan untuk

menekan biaya transportasi, agar saudara-saudara kita yang berada di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) bisa mendapatkan layanan transportasi yang baik dan juga bisa mendapatkan harga barang kebutuhan pokok yang juga terjangkau,” ucap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Minggu (5/2).

Dengan adanya subsidi perintis penumpang, tarif yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih terjangkau, karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan pemerintah. Sementara itu, dengan adanya subsidi perintis barang/kargo, barang yang diangkut tidak dikenakan biaya lagi sehingga dapat menstabilkan atau mengurangi disparitas harga barang di daerah tersebut.

Menhub mengatakan, kebutuhan pelayanan angkutan perintis sangat dibutuhkan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Ia menyebut, masih banyak daerah yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik untuk membuka aksesibilitas dan melancarkan pergerakan penumpang maupun barang.



Pelayanan angkutan jalan perintis rute Timika - Mioko di Kabupaten Mimika, Papua, 3/7/2021. Foto: BPTD XXV / Vicran Supusepa

“Kami secara intensif berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang penyediaan angkutan perintis. Para kepala daerah selalu menyampaikan aspirasi kepada kami agar Kemenhub dapat memberikan atau menambah pelayanan transportasi publik di daerahnya yang belum bisa diakses, atau yang belum dilayani secara optimal,” tutur Menhub.

Menhub mengatakan, selalu berupaya untuk memenuhi aspirasi dari daerah dengan melihat skala prioritas dan kemampuan APBN terkait besaran alokasi anggaran subsidi yang bisa diberikan. “Harapan kami, semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis naik kelas menjadi komersial, karena tujuan dari pemberian subsidi adalah

semakin meningkatnya taraf hidup dan daya beli masyarakat di daerah tersebut,” ujar Menhub.

Jika pelayanan transportasi di suatu daerah sudah menjadi komersial, maka alokasi anggaran subsidi dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan. “Subsidi Angkutan perintis merupakan bukti pemerintah hadir di tengah kebutuhan masyarakat untuk menda-

patkan layanan transportasi publik,” kata Menhub.

Di sektor perhubungan darat, alokasi subsidi perintis dan PSO diberikan untuk pelayanan angkutan jalan di 327 trayek, angkutan antarmoda di 37 trayek, angkutan barang di 6 lintasan, perintis penyeberangan di 273 lintas, *long distance ferry* di 2 lintas, serta angkutan perkotaan di 10 kota. (*)

DUKUNGAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS

Pada Tahun Anggaran 2023 ini subsidi keperintisan angkutan jalan ada pada 327 trayek dan subsidi angkutan barang ada di 6 lintasan, sementara untuk subsidi perintis penyeberangan ada di 274 lintas.



Sesditjen Perhubungan Darat Amirulloh memberikan keterangan pers dalam acara Media Briefing di Kantor Pusat Kemenhub Jakarta, 7/2/2023. Foto: HMS DJPD/WBW

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan anggaran sebanyak Rp774 Miliar untuk anggaran subsidi keperintisan di lingkup transportasi Darat. Hal itu disampaikan oleh

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh pada Selasa (07/02) dalam acara Media Briefing di Kementerian Perhubungan.

la menerangkan bahwa ada 3 jenis layanan keperintisan

di Perhubungan Darat yaitu angkutan jalan, angkutan barang, dan penyeberangan. “Kita ingin dengan adanya angkutan perintis menjadi Indonesia-sentris sehingga tidak lagi Jawa-sentris. Inilah kenapa angkutan perintis perlu ada karena kita berupaya wilayah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3 TP) harus dihubungkan sehingga terjangkau. Di 4 tahun terakhir (2020-2023) ada korelasi antara anggaran terhadap kondisi pandemi. Saat ini di mana kondisi sudah longgar sehingga tahun ini ada kenaikan anggaran 31% dari tahun sebelumnya yakni menjadi Rp. 774 Miliar. Adapun rinciannya yaitu angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Rp583 Miliar, Angkutan Jalan Perintis sebesar Rp177,4 Miliar, dan Angkutan Barang Perintis sebesar Rp13,5 Miliar,” kata Amirulloh.

Pada Tahun Anggaran 2023 ini subsidi keperintisan angkutan jalan ada pada 327 trayek dan subsidi angkutan barang ada di 6 lintasan, sementara untuk subsidi perintis penyeberangan ada di 274 lintas.

“Ada 6 hal yang menjadi prioritas kami dalam pengembangan angkutan jalan perintis yaitu perbatasan negara atau daerah terluar, daerah pendidikan nasional, daerah pasca bencana, daerah terisolir atau belum berkembang, kawasan transmigrasi, dan integrasi dengan moda angkutan perintis lainnya. Kami memang dengan tol laut sudah coba mengintegrasikan hal ini sehingga ke depannya harga manfaat dari tol laut yang sudah ada dapat lebih maksimal,” lanjutnya lagi.

Amirulloh menambahkan, bahwa jaringan trayek terus tumbuh. “214 Trayek dari Total Trayek yang dilayani oleh Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023 atau sekitar 65%, merupakan daerah asal-tujuan dan lintasan daerah (3TP),” ujarnya.

la menjelaskan jika Ditjen Hubdat juga terus berusaha dan mendorong bagaimana angkutan perintis bertumbuh menjadi komersil.

“Kalau daerah itu bisa menjadi komersil maka secara ekonomis itu sudah mulai menjadi daerah berkembang. Sejak tahun 2020, ada 10 trayek angkutan jalan perintis yang menjadi komersil. Di peta keperintisan yang terlihat ada di seluruh provinsi, kita ada di seluruh Indonesia,” katanya.

Tak jauh berbeda dengan angkutan jalan perintis, angkutan barang perintis juga hadir di wilayah-wilayah 3TP yang sangat membutuhkan sarana transportasi bagi barang kebutuhan masyarakat seperti di Tanjung Selor, Timika, Natuna, Merauke, dan Banda Aceh.

“Angkutan barang perintis hadir di daerah-daerah yang terintegrasi dengan tol laut karena itu hadir di pelabuhan yang ada rute tol lautnya. Dari evaluasi kami, selain disparitas harga yang mulai berkurang bahwa ada harga yang mulai turun dengan kehadiran pelayanan ini,” urai Amirulloh.

Di sisi lain, untuk angkutan penyeberangan perintis, kita sudah ada konsep Sabuk di mana



Dari kiri ke kanan: Kabag Pers dan Media BKIP Budi Rahardjo, Ketua Forwahub Ichsan, Sesditjen Perhubungan Darat Amirulloh, Direktur Angkutan Jalan Suharto, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Junaidi, di Press Room Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 7/2/2023. HMS DJPD/WBW

perintis merupakan bagian dari Sabuk Penyeberangan. Dalam 5 tahun terakhir, total lintas penyeberangan perintis yang dikomersilkan sebanyak 24 lintas. Salah satu kriteria angkutan penyeberangan perintis yang dijadikan komersil jika *load factor* nya melebihi 60%.

Dalam paparannya tersebut, Amirulloh menyampaikan bahwa salah satu peran keperintisan angkutan penyeberangan antara lain menghubungkan daerah 3TP dengan daerah yang sudah maju, meningkatkan perekonomian

daerah, menjaga tingkat inflasi, dan pemerataan pembangunan. “Salah satu manfaatnya, pada saat kapal *docking* dan tidak beroperasi karena cuaca buruk maka di daerah tersebut inflasi naik 2,5%. Karena pasokan bahan pokok tidak dapat diangkut,” jabarnya.

Hadir juga dalam acara tersebut yakni Direktur Angkutan Jalan Suharto, Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Junaidi, serta pengamat transportasi, Djoko Setijowarno. (*)



BPTD XVII Kaltim-Kaltara Kelola Mobilitas Rajut Konektivitas

Oleh: Tim Liputan infoHUBDAT

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Dengan wilayah kerja yang terbilang luas, yaitu 2 provinsi (Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat), 11 kabupaten (Kab. Kutai Timur,

Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Mahakam Ulu, Kab. Berau, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung,

Kab. Nunukan) dan 4 kota (Samarinda, Bontang, Balikpapan, Tarakan), BPTD XVII Kaltim Kaltara tak pernah patah arang. Konektivitas antar wilayah menjadi prioritas pelayanan BPTD ini. Selain itu terdapat layanan angkutan perintis, baik penyeberangan maupun angkutan jalan, serta dukungan pada IKN Nusantara.

Terdapat 4 (empat) satuan pelayanan yang berada di bawah pengelolaan BPTD XVII, antara lain: Terminal Tipe A Batu Ampar Balikpapan, Terminal Tipe A Samarinda Seberang, UPPKB KM.17 Karang Joang, dan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan.

Dalam upaya memainkan peran penting selaku pengelola transportasi di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, BPTD Kaltimra yang wilayahnya antara lain mencakup wilayah IKN (Ibukota Nusantara), terus berupaya merajut prestasi dengan meningkatkan kinerja melalui program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa program itu antara lain, pembangunan halte-halte sungai wilayah perairan, renovasi

tahap akhir 2 terminal angkutan jalan, penyediaan prasarana dan sarana kendaraan untuk angkutan karyawan ke area IKN, -mengangkut pekerja yang membuat mess- serta program sosialisasi kepada para pelajar mengenai undang-undang lalulintas dan keselamatan jalan.

Hal itu dikatakan Kepala BPTD Kaltimra Dr. Muiz Tohir, ST., MT. kepada Tim InfoHubdat di Balikpapan, Senin, (13/3). "Itu baru beberapa program saja, masih ada sejumlah agenda lain yang sangat strategis, seperti penyempurnaan akses jalan ke wilayah IKN dari berbagai daerah dan perbaikan sarana jalan untuk menunjang pariwisata ke Derawan dan infrastruktur pendukung," paparnya. Lebih jauh menurut Muiz, terdapat 5 (lima) isu strategis yang menjadi program BPTD Kaltim Kaltara yang telah menjadi program pembangunan infrastruktur APBN & APBD Provinsi Kaltim Tahun 2023 dan rencana Tahun 2024.

Kelima isu strategis yang jadi kewenangan transportasi darat itu yakni konektivitas, integrasi moda, kinerja pelayanan transportasi, transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi. Di tahun 2023, BPTD Kaltim Kaltara sudah melakukan implementasi dan strategi terkait kelima isu itu. Prinsipnya siap mendukung pembangunan Kaltim-Kaltara dalam sektor transportasi yang jadi kewenangan BPTD Kemenhub Hubungan Darat (Hubdat). "Inti utamanya adalah semua program ini merupakan masukan dan koordinasi dengan instansi mitra sejajar seperti Bappeda Kaltim serta sejumlah stakeholder lain seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Kaltim, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Kaltim, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (PPP) Kaltim, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan, Balai Wilayah Sungai



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVII Kaltim-Kaltara, Muiz Tohir

Kalimantan IV, Balai Wilayah Sungai Kalimantan VI," jelas Muiz. Intinya adalah untuk penguatan konektivitas dilakukan jaringan perintis subsidi serta revitalisasi dan optimalisasi pelayanan AKAP dan angkutan SDP. "Untuk revitalisasi dan optimalisasi pelayanan AKAP dan angkutan telah selesai di tahun 2022 dengan membangun Terminal Tipe A Samarinda Seberang (Sabang) dan sekarang sudah dimanfaatkan," paparnya. Menurut Muiz, Terminal Tipe A itu dikembangkan tidak hanya untuk kendaraan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), tetapi dimanfaatkan sebagai terminal angkutan kota (angkot) yang melintas di areal Samarinda.

"Kami juga memberikan kesempatan sinergi dengan instansi lain untuk pengembangan terminal. Tak hanya untuk aktivitas transportasi tetapi optimalisasi aset dapat dilakukan pengembangan UMKM atau *event-event* yang dilakukan di Terminal Sabang," jelasnya lagi. Adapun kegiatan lain, menurut Muiz adalah pembangunan bidang Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Tahun 2023. Di mana ada pembangunan 2 halte sungai di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang Detail Engineering Desain

(DED) sudah siap. "Kedua halte sungai itu semuanya ada di Kutim yakni di Desa Pelawan Sangkulirang dan Desa Saka juga Sangkulirang," ungkap Muiz. Untuk tahun 2023 dia menyebutkan ada tiga yakni pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Kramat tahap III, Pembangunan UPPKB di Kabupaten Paser Tahap IV dan pembangunan UPPKB KM 36 Samboja tahap V.

"Tentu untuk tahun 2024 kelanjutan yakni pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) tau jembatan timbang di Paser tahap V dan UPPKB KM 36 Samboja tahap VI. Mohon doa dan dukungannya untuk semua stakeholders," ungkapnya.

Lebih jauh menurut Muiz, BPTD Kaltimra sudah membuka akses sungai untuk pembangunan halte. Tetapi, diharapkan pemerintah kota-kabupaten juga mendukung akses jalan daratnya, sehingga pembangunan halte itu berfungsi maksimal. "Ini kan langkah BPTD Kaltimra membuka konektivitas untuk kepentingan masyarakat sekaligus peningkatan sisi ekonomi. Tetapi, kalau akses jalannya tidak maksimal tentu sayang pembangunan halte itu," pungkasnya. (*)



Angkutan Penyeberangan Perintis Tarakan-Nunukan-Sebatik

Oleh: Tim Liputan infoHUBDAT

Salah satu penerima subsidi untuk angkutan perintis adalah angkutan penyeberangan rute Tarakan-Nunukan-Sebatik yang dilayani KMP Manta II. Sebelumnya KMP Manta II ini juga melayani rute Sei Menggaris.

Kapal Ferry dari Nunukan ke Sebatik dan Tarakan merupakan satu-satunya angkutan Ferry yang melayani jalur Tarakan-Nunukan dengan jadwal trip 4 kali seminggu dengan waktu tempuh 8 jam. KMP Manta II berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Tarakan pukul 20.00 untuk tujuan Nunukan. Setibanya di Pelabuhan Sei Jepun Nunukan, KMP Manta II lanjut melayani rute Nunukan - Sebatik sebanyak 3 trip.

Penyeberangan dari Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun di Nunukan menuju Pelabuhan Penyeberangan Liang Bunyu di Pulau Sebatik berdurasi 25 menit dengan jarak tempuh sekitar 30 km. Namun jika dihitung mulai dari proses awal berlayar hingga sandar dan turun dari kapal, memerlukan waktu selama 40 menit.

Kabupaten Nunukan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota kabupaten terletak di kota Nunukan. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010).

Selain melayani penyeberangan dalam negeri atau Lokal, Pelabuhan Nunukan juga merupakan pelabuhan lintas Negara yakni menghubungkan Kota Nunukan dengan Kota Tawau, Malaysia.

Setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 orang mondar-mandir antar Nunukan dengan Tawau, Malaysia. Pulau Sebatik terbagi dua wilayah negara. Belahan utara seluas 187,23 km² merupakan wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia. Sedangkan belahan selatan dengan luas 246,61 km² masuk ke wilayah Indonesia di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Tarif Penyeberangan

Sejak awal bulan Januari 2023, PT ASDP Indonesia Ferry telah menerapkan penyesuaian tarif di lintasan Nunukan - Sebatik.

Bagi penumpang dewasa tanpa kendaraan, tarif penyeberangan sebesar Rp 10.000,-, sedangkan untuk anak-anak sebesar Rp 5.000,-.

Testimoni Masyarakat

Suryanti (41 tahun), seorang karyawan sebuah perusahaan asuransi swasta nasional cabang Nunukan Provinsi Kalimantan Timur hampir seminggu sekali mendatangi Pulau Sebatik

di Kabupaten Nunukan untuk melakukan aktivitas kantonya. Setiap kali berangkat ke Kecamatan Sebatik, ia selalu menggunakan angkutan penyeberangan ferry KMP Manta baik untuk keberangkatan maupun kepulangan. "Kebetulan ferry ini kan berangkat setiap hari 3 kali pulang pergi, jadi saya punya banyak pilihan jadwal. Jadi saya sangat senang dengan kehadiran KMP ini, kapalnya kan besar, waktunya tepat dan yang paling penting ongkosnya murah daripada naik *speedboat*," kata Suryanti. Dengan naik ferry, Suryanti mengaku lebih senang karena lebih mudah bawa kendaraan terutama mobil. "Kalau naik *speed* atau kapal biasa, sulit parkirnya," kata Suryanti.

Hanya saja, lanjut Suryanti, KMP Manta II hanya melayani Nunukan-Sebatik 3x sehari, karena sore hari sudah harus bersiap menuju Tarakan. "Jadi kalau sore hari ya saya harus naik sepeda motor supaya bisa naik kapal biasa," tandasnya.

Pujian serupa dilontarkan seorang penumpang lain, Fatma (52) yang mengaku rutin menggunakan ferry ketimbang naik kapal klotok atau kapal kecil. "Lebih nyaman, sambil istirahat setelah bekerja di Sebatik," kata Fatma.

Supervisor KMP Manta II, Imron mengakui kapalnya masih jadi andalan calon penumpang trayek Nunukan Sebatik terutama di hari libur. "Kalau *weekend* suka banyak yang datang ke patok perbatasan," ungkapnya.

Imron juga menegaskan, kehadiran kapal ferry yang mendapat subsidi Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ini dirasakan sangat bermanfaat oleh warga Nunukan dan Pulau Sebatik.

Di pihak lain, Syahbandar pembantu Syofian menambahkan selama ini pelayaran KMP Manta untuk trayek Nunukan-Tarakan-Sebatik ini berjalan cukup baik. (*)

Pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun, Nunukan, Kalimantan Utara, 8/3/2023. Foto: HMS DJPD/WBW



Moda transportasi darat yang membantu konektivitas antarwilayah, menjadi primadona dan pilihan masyarakat (publik). Mereka menjatuhkan pilihan ke transportasi yang dikelola Perum Damri untuk melintas trayek dalam provinsi maupun antarprovinsi.

Kendati, selain transportasi perintis milik Damri, juga ada pelayanan komersial. Hanya di Kaltara telah dibuka 3 lintasan yakni Tanjung Selor-Berau, Tanjung Selor-Tideng Pale (Kabupaten Tana Tidung) dan Malinau-Sei Ular (Nunukan). Di tiga lintasan ini, angkutan Damri digemari untuk membuka aksesibilitas ke masing-masing tujuan.

“Sejak tahun 2016 angkutan bus Damri sudah disediakan di Kaltara. Secara *headway* (jarak tempuh) bisa diatasi dengan pelayanan perintis itu. Lebih ekonomis dan masyarakat senang,” kata Kepala Cabang

Angkutan Jalan Perintis Digemari, Ekonomis dan Berbuah Manis

Damri Kaltara Tri Widjono Djati, mengurai angkutan perintis itu. Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat) katanya, telah membuka layanan angkutan di beberapa pelosok Kaltara yang masuk wilayah 3 TP (Tertinggal, Terluar, Terpencil dan Perbatasan).

Kehadiran layanan perintis ini, memang jadi *domain* Ditjen Hubdat Kemenhub yang fungsinya lebih pada agen pengembangan (*agent of development*). Karena,

kehadirannya memberi pengaruh signifikan. Di Kaltara, juga menjadi tugas serta kewenangan bidang lalu-lintas di bawah kepemimpinan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Kaltim-Kaltara DR Muiz Thohir ST MT dalam aspek sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan.

Lebih ekonomis karena, tarif untuk Tanjung Selor-Berau berkisar Rp50 ribu, Tanjung Selor-Tideng Pale (KTT) Rp 100 ribu dan Malinau-Sie Ular (Nunukan) Rp 120 ribu. Jika menggunakan armada lainnya, tarifnya bisa dua kali lipat. Secara total, di Kaltara angkutan Damri seluruhnya 13 unit dan tiap lintasan ada 3 unit armada yang satu lainnya

cadangan. “Tapi antar kota Tanjung Selor-Malinau itu hanya 1 armada dan jadwalnya dalam seminggu 2 kali,” ungkap Tri Widjono.

Di lintasan Sei Ular ke kota-kota di Nunukan yang konektivitas ke tempat lain, bisa menggunakan jalur eksisting seperti *speedboat*. “Misalnya ke Sebatik, bisa menggunakan klotok (kapal kecil) atau feri yang jadwalnya 3 kali sehari pada pagi hingga siang hari,” ujar Tri. Dalam kaitan jalur Damri dari Sei Ular-Malinau, menurut Tri dilakukan bergantian. Satu jalur ke Malinau dan besoknya dari Malinau ke Sei Ular

Sementara untuk jalur ke Tana Tidung dari Tanjung Selor, hanya ada satu armada yang beroperasi dan diharapkan itu mampu melayani masyarakat untuk bepergian menuju akses ke lainnya.

Dijelaskan Tri, masyarakat lebih memilih Damri karena murah baik penumpang dan mengangkut barang. Sehingga, kehadiran perintis itu ‘berbuah manis’ bagi mereka karena ada transportasi yang sangat murah. “Kita terus meningkatkan pelayanan termasuk juga menitikberatkan pada sisi keselamatan. Karena, itulah tujuan transportasi untuk masyarakat,” pungkask Tri.

Angkutan Jalan Perintis di Kalimantan Timur

Layanan Angkutan Subsidi Perintis Jalan di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Perum Damri Cabang Samarinda, layanan ini telah beroperasi sejak 2016.

Layanan angkutan jalan perintis di wilayah Kalimantan Timur sangat membantu masyarakat dalam mobilitas dan membuka konektivitas ke Samarinda. Pada tahun 2023 ini terdapat 8 trayek angkutan jalan perintis

di Provinsi Kalimantan Timur, trayek-trayek tersebut adalah sebagai berikut: Samarinda - Kembang Janggut, Samarinda - Jonggon, Samarinda - Bentian Besar, Samarinda - Muara Muntai, Sangatta - Maloy, Sangatta - Pengadan, Berau - Tanjung Batoe, Balikpapan - IKN Nusantara.

Berdasarkan data jumlah penumpang selama bulan Januari dan Februari 2023 yang diperoleh dari BPTD XVII Kaltimra, rute dengan *load factor* tertinggi adalah rute Samarinda - Pengadan, yaitu 23% baik di bulan Januari

(268 penumpang) maupun Februari (246 penumpang).

Sedangkan rute dengan *load factor* terendah adalah Tanjung Rejeb - Tanjung Batu, yaitu 2% baik di bulan Januari (20 penumpang) dan Februari (24 penumpang).(*)



Bus Damri Perintis memiliki *load factor* rendah. Nampak hanya 2 penumpang dalam bus.

Masyarakat lebih memilih Damri karena murah baik penumpang atau mengangkut barang. Sehingga, kehadiran perintis itu ‘berbuah manis’ bagi mereka karena ada layanan transportasi yang terjangkau.



Peta Trayek Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Kalimantan Timur T.A 2023
 1. Kembang Janggut; 2. Jonggon; 3. Bentian Besar; 4. Muara Muntai; 5. Sangatta - Maloy; 6. Sangatta - Pengadan; 7. Berau - Tanjung Batoe; 8. Balikpapan - IKN Nusantara

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah ajang balap perahu super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) pada tahun 2023 ini. Perhelatan bertaraf internasional tersebut akan diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara pada 24-26 Februari 2023. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno menyampaikan sejumlah dukungan dari Ditjen Hubdat untuk memperlancar terselenggaranya F1H2O. Dukungan yang diberikan tersebut antara lain konektivitas dan rekayasa lalu lintas selama masa pelaksanaan F1H2O di Balige.

“Dukungan dari Ditjen Hubdat yaitu berupa jalur transportasi dari / ke lokasi kegiatan, simulasi perjalanan 3 unit kontainer berdimensi 40 feet dari Pelabuhan Belawan hingga Balige, serta penyusunan rekayasa lalu lintas. Hingga saat ini dilaporkan bahwa jalur transportasi dari dan ke lokasi kegiatan menggunakan jalur untuk lintas kontainer dari Pelabuhan Belawan ke Balige dan akan mendapatkan pengawalan dengan perkiraan waktu perjalanan selama 7 jam dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam,” demikian disampaikan Dirjen Hendro pada Selasa (17/01).

Dirjen Hendro menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan F1H2O di Indonesia sebagai



Penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar.

DUKUNGAN DITJEN HUBDAT PADA F1H2O DI DANAU TOBA

Dirjen Hendro menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan F1H2O di Indonesia sebagai salah satu ajang olahraga internasional. Dukungan yang diberikan tersebut antara lain konektivitas dan rekayasa lalu lintas selama masa pelaksanaan F1H2O di Balige.



1

salah satu ajang olahraga internasional. Ia menjelaskan bahwa selanjutnya pihaknya akan melakukan survei lapangan bersama dengan Kementerian PUPR, termasuk mengenai simulasi perjalanan kontainer untuk meminimalisir adanya hambatan dan memeriksa kerusakan jalan yang berpotensi menghalangi perjalanan.

“Sementara penerapan rekayasa lalu lintas akan dilakukan di sekitar area venue F1H2O yaitu menuju dan keluar Balige. Sementara juga akan disusun peta potensi pergerakan mobilitas darat menuju kawasan Balige. Dari Dishub Toba akan membantu dalam hal evaluasi dan menyusun MRL di area venue F1H2O. Selanjutnya juga akan dievaluasi terkait kantong-kantong parkir yang difokuskan di jalan Lumban Silintong,” tambahnya.

Selain itu dari Direktorat Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat akan menyusun rencana alur kedatangan wisatawan dari berbagai jalur masuk menuju Balige sehingga tetap dapat dipastikan kondisi



2



3

lalu lintas aman dan lancar saat penyelenggaraan event tersebut.

“Untuk mendukung akses wisata dan kedatangan wisatawan, akan dilakukan penambahan dan integrasi antar-moda dari daerah terkait dari/menju Balige untuk mendukung angkutan dari dan ke Balige. Kemenhub, Pemprov Sumut, maupun Pemkab Toba akan bersama-sama membuat rencana penambahan dan integrasi antarmoda dari/menju Balige dari beberapa daerah lainnya. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara juga menyatakan saat ini sudah terdapat pelayanan DAMRI, bila diperlukan dapat dilakukan penambahan dan penyesuaian untuk mengakomodir acara,” jabar Dirjen Hendro lebih lanjut.

Dari segi kehadiran prasarana, dalam pelaksanaan F1H2O

didukung dengan keberadaan Pelabuhan Balige, Tigaras, Aji-bata, Ambarita, Muara, Tongging, Simaniindo, dan Bakara yang saat ini telah beroperasi. “Untuk moda angkutan juga beroperasi KMP di Danau Toba dan siap untuk melayani wisatawan. Sebanyak 5 sarana kapal pendukung seperti KMP Asa-Asa, KMP Jurung-Jurung, KMP Kaldera Toba, KMP Pora-Pora, dan KMP Ihan Batak,” pungkas Dirjen Hendro.*

1. Sejumlah kendaraan angkutan kontainer yang membawa peralatan powerboat mendapatkan pengawalan dari Ditlantas Polda Sumut
2. KMP Kaldera Toba disiapkan untuk melayani wisatawan di Danau Toba, khususnya pada saat berlangsungnya F1H2O, 24-26 Februari 2023
3. Dukungan transportasi darat pada saat penyelenggaraan F1H2O berupa shuttle bus

WAJAH ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA BUY THE SERVICE

Oleh: Djoko Setijowarno



Kondisi terkini Angkutan Perkotaan dengan skema *buy the service* di 10 kota, dilayani 47 koridor dengan 741 unit bus dan 111 angkutan feeder. Total penumpang yang diangkut 40.897.481 jiwa dengan tingkat isian (load factor) 44,24 persen, dan fare box revenue Rp 11,1 miliar.

Berangkat dari amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang. Mayoritas penumpang merupakan masyarakat rentan secara ekonomi, fisik, maupun sosial.

Karena itu, sudah sewajarnya layanan transportasi umum dipandang sebagai layanan dasar yang memang harus tersedia dan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara terjangkau, aman, selamat, nyaman, dengan menjunjung unsur kesetaraan serta keteraturan.

Tahun 2045 diperkirakan 230 Juta penduduk akan bertempat tinggal di perkotaan (Bappenas, 2019). Dampak sekarang, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jabodetabek sebesar Rp 71,4 triliun per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan waktu hilang. Terjadi pemborosan BBM sebesar 2,2 Juta liter per hari.

Salah satu permasalahan perkotaan adalah kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh dominasi kendaraan pribadi vs angkutan umum. Tanggung jawab angkutan umum pada Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan sendiri (kecuali Jakarta). Meskipun nyatanya ada 7 kota memiliki anggaran untuk memberikan subsidi operasional angkutan umum, seperti Banda Aceh (Trans Koetaradja), Padang (Trans Padang), Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru), dan Tangerang (Trans Ayo), Semarang (Trans Semarang), Banjarmasin (Trans Banjarmasin), dan Surabaya (Suroboyo Bus).

Oleh sebab itu perlu dukungan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Pemberian Subsidi Pembelian Layanan (*buy the service*) di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disebut Teman Bus telah dilaksanakan di 10 kota, yakni Medan (Trans Metro Deli), Palembang (Trans Musi Jaya), Jogjakarta (Trans Jogja), Solo (Batik Solo Trans), Denpasar



Sebuah bus Trans Metro Dewata sedang melaju di jalanan di Bali (1/10/2020). Trans Metro Dewata menjadi salah satu pengembangan angkutan massal berbasis jalan yang disubsidi oleh pemerintah, serta melengkapi layanan bus Trans Sarbagita yang telah ada sebelumnya. Foto: HMS DJPD/WBW

(Trans Metro Dewata), Bandung (Trans Metro Pasundan), Purwokerto (Trans Banyumas), Banjarmasin (Trans Banjarbakula), Makassar (Trans Mamminasata), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya). Sementara yang dikelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dengan Program BisKita, baru diselenggarakan di Kota Bogor (Trans Pakuan) tahun 2021. Total sudah beroperasi transportasi perkotaan di 11 kawasan peerkotaan.

Buy The Service (BTS) dilakukan dengan membeli layanan dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal menjalankan *push and pull strategy*. Hal itu dilakukan dalam upaya untuk beralihnya masyarakat dari

kendaraan pribadi ke transportasi umum. Bukan hal yang mudah dilakukan di tengah kenyamanan penggunaan kendaraan pribadi terutama sepeda motor.



Sejumlah penumpang hendak menaiki bus Trans Metro Deli di Kota Medan. Foto: istimewa

Pengguna angkutan perkotaan mengalami penurunan *demand* secara signifikan, ketika masyarakat semakin tergantung pada kendaraan pribadi. Apabila dibiarkan, maka angkutan perkotaan terancam punah. Dan sudah banyak kota-kota di Indonesia tidak memiliki lagi angkutan umum yang memadai. Jikapun ada, hanya tinggal sisa armada yang masih mampu beroperasi apa adanya, namun sudah tidak bisa lagi melakukan peremajaan.

Penyelamatan angkutan perkotaan harus menjadi prioritas kebijakan Pemerintah. Intervensi pemerintah dibutuhkan untuk meremajakan kembali atau *rejuvenate* dan mengembalikan daya saing angkutan perkotaan. Penerapan skema pembelian pelayanan (*buy the service*) merupakan intervensi yang dilakukan Pemerintah dengan membeli produksi layanan angkutan perkotaan.

Manajemen transportasi skema *buy the service* tidak menggunakan sistem setoran (pengemudi mendapat gaji bulanan), operator hanya berkonsentrasi pada pelayanan, pembayaran sesuai dengan “km” layanan, dan mempunyai standar pelayanan tertentu.

INFO ANGKUTAN

Data dari Ditjenhubdat per 18 Januari 2023, di 10 kota dilayani 47 koridor dengan 741 unit bus dan 111 angkutan *feeder*. Total penumpang diangkut 40.897.481 jiwa, tingkat isian (*load factor*) 44,24 persen, fare box revenue Rp 11,1 miliar.

Profil penumpang berdasarkan berdasarkan kelompok usia didominasi oleh pengguna dengan usia 21-30 tahun (40,24 persen) yang merupakan usia produktif. Berikutnya usia lebih dari 41 tahun (21,63 persen), 31-40 tahun (21,43 persen), usia 17-20 tahun (12,37 persen) dan usia kurang dari 17 tahun (4,33 persen).

Sementara profil penumpang berdasarkan kendaraan yang dimiliki, Sebagian besar penggunaan layanan memiliki kendaraan pribadi sepeda motor 61,17 persen, sepeda motor dan mobil 14,29 persen, tidak memiliki kendaraan pribadi 13,08 persen, sepeda 6,94 persen dan mobil pribadi 4,53 persen.

Ada peralihan pemakai sepeda motor menggunakan bus sebanyak 62 persen.

Rata-rata tingkat isian statis sebelum berbayar 79,73 persen, namun sesudah berbayar per 31 Oktober 2022 terjadi penurunan 35,56 persen, sehingga tingkat isian statis menjadi 51,38 persen.

Kondisi Terkini

Trans Semanggi Suroboyo mulai beroperasi 1 Februari 2022 baru memiliki 1 koridor (45,66 km) dari rencana 10 koridor dengan 67 halte dan 17 armada bus besar. Rata-rata tingkat isian statis

70,60 persen, peralihan pengguna sepeda motor 58 persen. Sebelumnya sudah beroperasi Suroboyo Bus dibiayai APBD Pemkot. Surabaya.

Batik Solo Trans (Solo) mulai beroperasi Juli 2020 memiliki 6 koridor (227,5 km) dengan 54 titik integrasi (termasuk angkutan *feeder*)

mengoperasikan 116 unit bus sedang dan besar.

Rata-rata tingkat isian statis 66,89 persen, peralihan pengguna sepeda motor 77 persen. Batik Solo Trans melayani hingga Kawasan Bandara Adi Soemarmo dan ada kebijakan *contra flow* di Jalan Slamet Riyadi. Terhubung dengan KRL Yogya-Solo dan Bus Trans Jateng Tirtanadi-Sumber Lawang. Tahun ini akan dihubungkan Bus Trans Jateng koridor Wonogiri-Sukoharjo.

Trans Musi Jaya (Palembang) mulai beroperasi 2 Juni 2020



Trans Semanggi Suroboyo

memiliki 4 koridor (127,2 km) dengan 11 titik integrasi mengoperasikan 194 unit bus sedang dan besar. Rata-rata tingkat isian statis 24,74 persen, peralihan pengguna sepeda motor 60 persen. Sebagai pendukung LRT Sumatera Selatan.

Trans Metro Deli (Medan) mulai beroperasi November 2021 memiliki 5 koridor (143,19 km) dengan 9 titik integrasi mengoperasikan 72 unit bus besar dan sedang. Rata-rata tingkat isian statis 50,68 persen, peralihan pengguna sepeda motor 52 persen.

Trans Jogja (Yogyakarta) mulai beroperasi 2 Oktober 2020 memiliki 3 koridor (106,3 km) dengan 71 titik integrasi mengoperasikan 43 unit bus sedang. Rata-rata tingkat isian statis 27,10 persen, peralihan pengguna sepeda motor 56 persen.

Trans Banyumas (Purwokerto) mulai beroperasi 6 Desember 2021 memiliki 3 koridor (117 km) dengan 18 titik integrasi mengoperasikan 52 unit bus sedang. Rata-rata tingkat isian

statis 63,83 persen, peralihan pengguna sepeda motor 66 persen. Terhubung dengan Bus Trans Jateng koridor Purwokerto-Purbalingga.

Trans Banjarbakula (Banjarmasin) mulai beroperasi 1 Februari 2022 memiliki 4 koridor (165,66 km) dengan 11 titik integrasi mengoperasikan 75 unit bus sedang. Rata-rata tingkat isian statis 60,54 persen peralihan pengguna sepeda motor 67 persen.

Trans Metro Pasundan (Bandung) mulai beroperasi 21 Desember 2021 memiliki 5 koridor (212 km) dengan 6 titik integrasi mengoperasikan 74 unit bus besar dan sedang. Rata-rata tingkat isian statis 51,23 persen, peralihan pengguna sepeda motor 63 persen.

Trans Metro Dewata (Denpasar) mulai beroperasi 6 September 2020 memiliki 5 koridor (258,7 km) dengan 60 titik integrasi mengoperasikan 105 unit bus sedang. Rata-rata tingkat isian statis 38,01 persen, peralihan pengguna sepeda motor 61 persen. Trans Metro Dewata melayani hingga Kawasan Bandara Ngurah Rai.

Trans Mamminasata (Makassar) mulai beroperasi Desember 2021 memiliki 4 koridor (196 km) dengan 2 titik integrasi mengoperasikan 105 unit bus sedang. Rata-rata tingkat isian statis 50,07 persen, peralihan pengguna sepeda motor 54 persen. Trans Mamminasata masuk Kampus, sudah melayani di dalam Kawasan Kampus Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin di Gowa. Dapat terintegrasi dengan jaringan KA Sulawesi Selatan (lintas

Maros-Garonggong).

Angkutan pengumpan (*feeder*) di Solo mulai beroperasi Juli 2022 memiliki 6 koridor (126,9 km) dengan 111 mobil penumpang umum. Rata-rata tingkat isian statis 67,08 persen.

Angkutan pengumpan (*feeder*) di Palembang mulai beroperasi Juli 2022 memiliki 2 koridor (60,6 km) dengan 87 mobil penumpang umum sedang. Rata-rata tingkat isian statis 120,33 persen.

Trans Pakuan (Bogor) beroperasi sejak 2 November 2021, dengan melayani 4 rute perjalanan (98,7 km) dari rencana 6 rute. Jumlah armada 47 bus sedang. Tersedia 119 halte atau *shelter*, terdiri dari 53 halte aset Pemkot Bogor, 29 rambu stop, 24 halte permanen dibangun BPTJ dan 13 halte *portable*.(*)



Trans Banyumas

Seiring dengan kenaikan harga BBM pada beberapa waktu lalu, untuk menyikapinya Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendorong seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk semakin aktif menggunakan angkutan umum. Kehadiran angkutan umum dinilai sebagai salah satu jalan keluar untuk menyalakan kenaikan harga BBM sehingga Kemenhub terus mengupayakan kenaikan penggunaan angkutan umum secara luas.

“Saat ini konsumsi BBM didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang mencapai 97%. Penyebabnya adalah dominasi pergerakan masyarakat yang masih dilayani oleh kendaraan pribadi, terutama di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong penggunaan angkutan umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia melalui pengembangan *bus rapid transit* (BRT) dengan skema *buy the service* (BTS). Adapun skema BTS ini hadir dengan tujuan untuk memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, serta untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan,”



Masyarakat diajak menggunakan angkutan umum untuk mobilitas sehari-hari.

KEMENHUB TERUS DORONG MASYARAKAT GUNAKAN ANGKUTAN UMUM

Hingga saat ini upaya membangun angkutan umum perkotaan masih terus dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Pemantapan program yang sudah berjalan dan pengembangannya akan terus dilakukan.

ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno pada Kamis (19/01).

Hingga saat ini upaya membangun angkutan umum perkotaan masih terus dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Pemantapan program yang sudah berjalan dan pengembangannya akan terus dilakukan oleh Kemenhub. Se-

cara simultan juga akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semakin menyempurnakan keberadaan angkutan umum di Indonesia.

“Ke depannya, Kemenhub melalui Ditjen Hubdat akan melakukan berbagai hal untuk menekan konsumsi BBM dengan beberapa cara salah satunya melakukan pendampingan pada kota-kota yang sudah mengembangkan angkutan umum sehingga kota-kota tersebut akan menemukan cara untuk mengoptimalkan pelayanannya yang ditunjukkan dengan meningkatnya daya angkut dan jumlah penumpang di setiap tahunnya,” jabar Dirjen Hendro.

Usaha lainnya yaitu dengan mendorong serta memfasilitasi pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk duduk bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) agar dapat menemukan langkah bersama dalam memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat, termasuk penataan kembali jaringan trayek sehingga



1. Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum di Yogyakarta, 11/12/2022. Foto: HMS DJPD/CAS

2. Sejumlah anak dan masyarakat umum menaiki bus Trans Banyumas pada saat peresmian pengoperasian perdana Trans Banyumas, 5/12/2021. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan Trans Banyumas sebagai angkutan umum yang aman, nyaman, mudah diakses dan terjangkau oleh semua kalangan.

masyarakat bisa beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum.

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha jasa angkutan, dalam hal ini Organda yang tersebar di setiap daerah, memang menjadi tantangan utama agar pengembangan angkutan umum perkotaan dapat cepat terlaksana. Kolaborasi perlu terus ditingkatkan, guna mewujudkan angkutan umum perkotaan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau sebagai diamanahkan dalam UU 22 tahun 2009,” jelasnya lebih lanjut lagi.

Kolaborasi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan Organda menjadi keharusan agar tercipta kesepahaman, sehingga semua unsur memiliki kemampuan dan kemauan bersama dalam membangun angkutan umum

perkotaan, baik dari sisi pembiayaan, kelembagaan, dan manajemen pengelolaan.

Di samping itu, dalam beberapa tahun terakhir Ditjen Hubdat mempromosikan Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum yang merupakan ajakan moral untuk mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum. Salah satu caranya melalui program *“public transport day”* bagi para pegawai di lingkungan pemerintah daerah untuk menggunakan angkutan umum.

Selain hal tersebut di atas, Ditjen Hubdat juga secara konsisten dan berkesinambungan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit terjangkau karena topografi dan kondisi geografis, yang diwujudkan melalui program angkutan perintis.

“Tak kurang dari 336 trayek angkutan jalan perintis dan 6 lintasan subsidi perintis angkutan barang yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Program angkutan perintis ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan menumbuhkan roda perekonomian di masyarakat. Untuk mendukung kelangsungan layanan ini, hadir angkutan barang perintis melalui jalur darat yang melayani perpindahan barang dari dan ke angkutan laut perintis, angkutan penyeberangan perintis, angkutan udara perintis, dan/atau pusat distribusi logistik,” ungkap Dirjen Hendro.

la menjelaskan bahwa pelayanan subsidi angkutan barang perintis hadir di 5 wilayah antara lain di Aceh, Natuna, Tanjung Selor, Merauke (2 lintasan), dan Mimika. Pada tahun 2022 subsidi anggaran angkutan barang perintis sebanyak Rp 15 Miliar. Melalui kehadiran subsidi angkutan barang perintis ini diharapkan akan dapat mengurangi disparitas harga antar wilayah di Indonesia sehingga tetap menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok.

“Guna mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19, Ditjen Hubdat juga memberikan pelayanan angkutan umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sering dikenal dengan 10 Bali baru. Perlahan tapi pasti sektor pariwisata mulai tumbuh kembali dengan layanan tersebut dan roda perekonomian mulai bangkit kembali,” jelas Dirjen Hendro.

Pelayanan angkutan umum baik di wilayah perkotaan, kawasan 3TP, dan kawasan pariwisata nasional telah menjalankan fungsinya sebagai *promoting sector* dan *servicing sector* serta mampu menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat sekaligus sebagai langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan di berbagai daerah.*

Pada hari Kamis (30/03) Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Rute Kupang-Dili resmi beroperasi. Dalam kegiatan bertajuk Penandatanganan SOP MoU *On Cross Border Movement by Commercial Buses and Coaches*, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarno bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dan Direktur Jenderal Transportasi dan Komunikasi Timor Leste, Constantino Ferreira Soares melakukan *flag off* bus yang akan digunakan untuk melintasi Kupang-Dili.

“Penandatanganan pagi ini sebagai implementasi visi Presiden Jokowi yakni pembangunan yang merata dan berkeadilan salah satunya dengan membangun wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) termasuk perbatasan,” kata Dirjen Hendro dalam peresmian yang

ANGKUTAN LINTAS BATAS NEGARA KUPANG-DILI RESMI BEROPERASI

Penandatanganan SOP dan MoU ini merupakan upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang transportasi dan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman.

diadakan di Terminal Bimoku, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut bahwa ketentuan ini telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu

dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. “Kementerian Perhubungan telah menyiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) dan membangun sarana dan prasarana termasuk moda transportasi di kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan kawasan sekitarnya termasuk perbatasan antara Indonesia-Timor

Leste. Penandatanganan SOP dan MoU ini tentu sebagai upaya kedua negara untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang transportasi dan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman,” katanya lebih lanjut.

Ia juga menyampaikan selamat dan apresiasi tinggi kepada delegasi kedua negara yang telah menyelesaikan SOP dengan baik dan diharapkan ke depannya kedua belah pihak dapat mengimplementasikan kerjasama tersebut dengan membuka pelayanan bus ALBN rute Kupang-Dili.

“Nanti ke depan setelah Mota’ain selesai kita akan melakukan kerjasama dalam angkutan barang, kalau sekarang angkutan orang nanti ke depan angkutan barang karena potensi ekonomi perbatasan NTT-Timor Leste sangat luar biasa. Berdasarkan pengalaman kerjasama bilateral transportasi darat sebelumnya dengan Malaysia maupun Brunei Darussalam dalam hal pelayanan ALBN telah memberikan dampak yang sangat positif dalam memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan,” jabar Hendro.



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, bersama Dirjen Transportasi dan Komunikasi Timor Leste, Constantino Ferreira Soares, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat melakukan *flag off* bus ALBN Kupang-Dili (30/3/2023). Foto: HMS DJPD/MAD.

Senada dengan Dirjen Hendro, Direktur Jenderal Transportasi dan Komunikasi Timor Leste, Constantino Ferreira Soares menyampaikan, “Saya mengucapkan selamat atas usaha dari semua pihak atas terlaksananya perlintasan perbatasan oleh bus komersial. Kerjasama ini mengacu pada perjanjian yang disetujui oleh kedua negara dengan tujuan untuk menyatukan hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik sejak beberapa dekade lampau. Dengan perjanjian yang ditandatangani ini memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam pemilihan moda transportasi untuk memobilisasi orang termasuk barang melintasi perbatasan antar kedua negara,” katanya. Untuk pelayanan Angkutan Lintas Batas Negara akan beroperasi

dengan menggunakan 5 unit bus dengan kapasitas 24 tempat duduk dari Operator Bus Indonesia dan 5 unit bus dengan kapasitas 34 dari Operator Bus Timor Leste. Adapun operator yang melayani dari Indonesia yaitu Perum Damri dan PO Bagong Transport, sementara dari Timor Leste yaitu Hamutuk Babadok Translog, LDA.

Fasilitas yang terdapat dalam bus ini terbagi menjadi 3 antara lain: AC dan toilet, AC dan non toilet serta AC, toilet, dan WIFI. Sementara itu rute awal keberangkatan dari Terminal Bimoku Kota Kupang melintasi daerah Soe-Kefamenanu-Atambua-PLBN Motaain dan titik akhir tujuannya di Dili Timor Leste.

Khusus tanggal 30 Maret 2023 harga tiket digratiskan sebagai promosi awal oleh operator angkutan yang melayani. Mulai tanggal 31 Maret 2023 tarif akan berlaku berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh Operator Bus Indonesia dan Timor Leste yaitu untuk operator Bus Indonesia dengan fasilitas AC sebesar Rp.350.000, dan dengan fasilitas AC dan toilet sebesar Rp. 375.000 kemudian Operator Bus Timor Leste dengan fasilitas AC, toilet, WIFI, *Mobile Charge* dan TV dikenakan tarif sebesar \$40-\$60.

Kegiatan penandatanganan SOP MoU *On Cross Border Movement by Commercial Buses and Coaches* ini dilakukan dengan perwakilan dari Indonesia yakni Direktur Angkutan Jalan, Suharto dan perwakilan dari Timor Leste yaitu Direktur *Land Transport Ministry Of Transportation and Communication*, Antonio Da Costa.*



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, bersama Dirjen Transportasi dan Komunikasi Timor Leste, Constantino Ferreira Soares, usai Penandatanganan SOP MoU *On Cross Border Movement by Commercial Buses and Coaches* di Kupang (30/3/2023). Foto: HMS DJPD/MAD.



Sebuah bus DAMRI Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) rute Kupang - Dili disiapkan untuk pengoperasian perdana di Terminal Bimoku, Kupang, Nusa Tenggara Timur (30/3/2023). Foto: BPTD NTT.

Kendaraan Listrik, Kearifan Lokal Bertransportasi Masyarakat Asmat

Oleh: Djoko Setijowarno



Tidak banyak yang tahu jika sejak 2007 warga di Kota Agats Kabupaten Asmat (Provinsi Papua Selatan) sudah menggunakan kendaraan listrik kendaraan listrik (electric vehicle) untuk bermobilitas. Keterbatasan mendapatkan BBM salah satu kendala pada waktu itu.



Suasana Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Masyarakat Kota Agats menggunakan sepeda motor listrik untuk mobilitas sehari-hari. Foto: istimewa

x 30 meter, perluasan lahan parkir pesawat (apron) menjadi 90 meter x 70 meter dan landas hubung (taxiway) menjadi 86 meter x 15 meter. Juga dilengkapi dengan fire fighting kategori IV dan pembuatan runway strip.

Isolasi dibuka dengan pengembangan Bandara Ewer yang terletak di Pulau Ewer. Untuk mencapai Kota Agats ibukota Kabupaten Asmat (Provinsi Papua Selatan) dapat menggunakan speedboat lebih kurang 20 menit setelah pesawat terbang mendarat di Bandara Ewer yang terletak di Pulau Ewer. Menggunakan speedboat dengan tarif Rp 100 per orang atau Rp 200 ribu untuk tiga orang penumpang.

Seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyamakan visi misi dalam pelaksanaan tugas khususnya pada sektor Perhubungan Darat.

Bandara Ewer telah mengalami peningkatan layanan. Semula hanya dapat didarati pesawat perintis jenis propeller.

Penerbangan dari Maerauke ditempuh 1,5 jam dan dari 45 menit dari Timika (Kab. Mimika). Sekarang Bandara Ewer sudah dapat didarati pesawat jenis ATR 72 kapasitas 70 penumpang sejak 10 Agustus 2021. Penerbangan dilakukan dengan rute Timika - Ewer - Merauke pulang pergi.

Bandara Udara Ewer yang dikembangkan adalah pembangunan terminal baru menjadi seluas 48 meter persegi, perpanjangan landas pacu (runway) menjadi 1.600 meter

Dalam seminggu ada dua kali penerbangan. Sebelumnya sudah ada penerbangan setiap hari dari Timika dan Merauke menggunakan penerbangan perintis dengan kapasitas kurang dari 15 penumpang. Dari Timika tersedia pula pesawat terbang sistem sewa.

Sementara akses laut selain sudah ada pelabuhan yang melayani kapal pelayara rakyat, juga sudah dibangun Pelabuhan Laut Asmat. Ada tiga kapal perintis yang singgah di Pelabuhan Agats, yaitu KM Sirimau, KM Tatamilau, dan KM Leuser. Kapal-kapal tersebut melayani rute Pelabuhan Pomako (Timika) - Pelabuhan Agats - Pelabuhan Merauke dan sebaliknya. Perjalanan dari Timika ke Agats memakan waktu sekitar 12 jam. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Kab. Asmat disuplai dari Timika.

Mobilitas warga menggunakan motor listrik

Kota Agats sering disebut kota rawa. Kota yang dibangun di atas rawa dengan jaringan jalan berupa jembatan kayu pada mulanya selebar 4 meter. Kemudian mulai terbangun jembatan komposit baja beton tahun 2010. Sebelumnya seluruh jaringan jalan berupa jalan kayu. Sudah terbangun fasilitas jembatan gantung sepanjang 72



Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo mengendarai motor listrik saat kunjungannya ke Asmat, Papua, 14/2/2018. Foto: Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan

meter dengan lebar 1,6 meter yang menghubungkan Kampung Keye menuju Ibu Kota Kabupaten Asmat, Agats. Pembangunan dimulai sejak September 2018 dan selesai pada 30 Maret 2019.

Pada tahun 2018, setidaknya ada sebanyak 1.280 motor listrik yang berlalu-lalang dan digunakan oleh penduduk Agats. Jarang atau bahkan hampir tidak ada penduduk yang menggunakan kendaraan dengan bahan bakar bensin.

Motor dengan BBM biasanya hanya digunakan oleh pihak kepolisian, sedangkan kendaraan berupa mobil hanya dipakai oleh rumah sakit dalam bentuk ambulans atau mobil pemerintah.

Saat ini sudah mencapai lebih dari 4.000 unit kendaraan listrik (electric vehicle). Menariknya, motor listrik di distrik tersebut dikategorikan sepeda, penggunaan plat nomor hanya penanda sebagai pengganti stiker retribusi, sehingga para pemiliknya tidak memiliki STNK atau SIM dan tidak dikenakan pajak kendaraan.

Kota Agats adalah kota tanpa lampu pengatur lalu lintas (traffic light), sangat minim kecelakaan lalu lintas, tidak ditemukan Polisi Lalu Lintas berada di tepi jalan. Tidak ada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), meskipun mayoritas menggunakan motor listrik.

Sudah ada peraturan daerah yang mengaturnya, yakni Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu ada juga Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Perbub No.24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat, hingga November 2018 tercatat 3.154 kendaraan listrik. Terbanyak sepeda motor listrik 3.067 unit. Terdapat 22 pangkalan ojek listrik. Ojek yang beroperasi di





Kota Agats menggunakan plat kendaraan berwarna kuning.

Regulasi itu mengatur retribusi kendaraan bermotor listrik (ojek) yang disewakan sebesar Rp 500.000 per tahun, retribusi kendaraan bermotor listrik pribadi Rp150.000 per tahun, dan sewa lahan untuk ojek Rp1 juta per tahun.

Kota Agats sudah memberikan contoh suatu wilayah yang mengalami kesulitan distribusi BBM tidak selalu mempertahankan tetap menggunakan kendaraan motor bakar. Namun mau beralih menggunakan kendaraan motor listrik. Pemerintah Pusat dapat memberikan penghargaan bagi Kab. Asmat yang sudah membantu mengurangi penggunaan BBM.

Indonesia sedang alami krisis energi (BBM), sebanyak 80 persen BBM subsidi dinikmati pengguna transportasi. Indonesia mengimpor BBM lebih 50 persen dari kebutuhan, sudah saatnya mencabut subsidi BBM.

Untuk daerah-daerah di Indonesia yang kesulitan distribusi BBM dapat mencontoh Kab. Asmat dengan menggunakan kendaraan listrik. Ongkos angkut distribusi BBM dapat dihemat. Sebaiknya mengembangkan kendaraan listrik di daerah yang kesulitan mendapatkan BBM. Kendaraan

listrik dapat digunakan untuk transportasi lokal.

Rencana Kementerian Perindustrian memberikan subsidi mobil *hybrid* wacana subsidi sebesar Rp 40 juta, mobil listrik berbasis baterai Rp 80 juta, pembelian motor listrik Rp 8 juta, dan motor listrik hasil konversi sebesar Rp5 juta, sebaiknya tidak diberikan untuk konsumen kendaraan listrik di perkotaan apalagi di Pulau Jawa. Berikanlah ke daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan BBM, disarankan



warganya menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas lokalnya.

Di perkotaan, subsidi kendaraan listrik diberikan membenahi transportasi umum dengan menggunakan bus listrik.(*)

1. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Agats berwarna kuning
2. Sebuah sepeda motor listrik yang disewakan juga menggunakan plat nomor berwarna kuning
3. Di Kota Agats tidak tersedia SPKLU, warga melakukan pengisian daya untuk baterai sepeda motor menggunakan sambungan listrik rumah
4. Suasana Kota Agats, Asmat, masyarakat menggunakan sepeda motor listrik untuk kegiatan sehari-hari

PENGAWASAN BUS JELANG ANGKUTAN LEBARAN PASTIKAN LAIK JALAN



Suasana pemeriksaan kelaikan kendaraan bus AKAP di Terminal Bus Kota Bekasi (28/3/2023).

Menjelang periode Angkutan Lebaran 2023, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat saat ini tengah gencar melaksanakan pemeriksaan kendaraan atau *rampcheck* bagi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Pariwisata.

Per Rabu (15/03), terpantau sebanyak 7.660 unit bus telah diperiksa kelaikannya. "Sebanyak 6.246 kendaraan (81,5%) dinyatakan laik jalan, sementara 1.414 kendaraan (18,5%) dinyatakan tidak laik. Berdasarkan jenis angkutan yang telah dilakukan *rampcheck*, bus AKAP sebanyak 5.083 unit bus (67%), bus AKDP 1.448 unit bus (19%), dan bus Pariwisata 1.014 unit bus (14%)," demikian disampaikan oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto

Restyawan dalam *Media Briefing* yang diadakan di Kemenhub pada Kamis (16/03).

Danto menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan *rampcheck* dilakukan dari tanggal 27 Februari 2023 hingga 17 April 2023 mendatang di Terminal Bus AKAP dan AKDP, Pool Bus Pariwisata dan Kawasan Pariwisata.

"Para petugas yang melakukan *rampcheck* akan memberikan pelaporan secara *realtime* pada website MitraDarat dengan mencantumkan Unsur Teknis, Unsur Administrasi, Nomor Sticker, Nama dan Nomor Registrasi Penguji, Nama Pengemudi, Nama PPNS," kata Danto.

Secara total, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada periode Angkutan Lebaran 2023 memper-

siapkan 111 Terminal Tipe A dan 57.693 unit bus.

"Kegiatan *rampcheck* merupakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari tata cara pemeriksaan unsur administrasi dan unsur teknis dengan dilakukan secara terus menerus sebagai tugas rutin di terminal penumpang dan terminal barang serta dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan di tempat pool bus dan tempat wisata," jelas Danto.

Danto juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil temuan petugas *rampcheck* di lapangan, didapatkan mayoritas kendaraan tidak laik antara lain disebabkan oleh:

1. Administrasi Perizinannya habis masa berlaku;
2. Beroperasi tidak sesuai jenis pelayanan angkutan, misalnya Angkutan Pariwisata digunakan trayek AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AJAP (Antar Jemput Antar Provinsi);
3. Masa berlaku uji berkala habis; dan
4. Kekurangan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan.

Melalui kesempatan ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh menyatakan bahwa pihaknya telah merilis aplikasi MitraDarat untuk memeriksa kelaikan bus yang akan digunakan masyarakat untuk mudik.

"Saat ini kami di Ditjen Hubdat telah meluncurkan aplikasi MitraDarat yang dapat diunduh di *Play Store* dan *App Store*. Masyarakat dapat memeriksa kendaraan yang akan dinaiki apakah sudah laik jalan atau tidak pada menu 'Cek LAIK' di MitraDarat. Ke depannya akan banyak juga info penting yang akan kami sampaikan melalui aplikasi tersebut," tutup Amirulloh.(*)

Guna memberikan apresiasi program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan demi mengoptimalkan PNPB sektor pelayanan publik UPUBKB, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Termasuk Dalam Program STRANAS PK di Hotel Millenium Jakarta pada Senin (30/01). Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas diperolehnya klasifikasi akreditasi A pada UPUBKB Pemerintah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diberikan sertifikat akreditasi secara langsung kepada kepala daerah masing-masing.

“Sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan, Kementerian Perhubungan mendapatkan tanggung jawab pada pilar ke-3 yaitu kendaraan yang berkeselamatan. Untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan dilaksanakan melalui pengujian kendaraan bermotor. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota harus sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagai bentuk pengakuan bahwa unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarno dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, sejalan dengan program akreditasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki program aksi strategi nasional pencegahan korupsi yaitu dengan optimalisasi penerimaan negara melalui



Petugas UPT PKB Dishub sedang Sosialisasi Uji Kendaraan Secara Berkala (Foto: Pekanbaru.go.id). UPT PKB Dishub Kota Pekanbaru menjadi salah satu proyek percontohan UPUBKB yang telah memenuhi target capaian periode tahun 2021-2022 sebesar 100% dengan Akreditasi A.

APRESIASI PUSAT BAGI UPUBKB TERAKREDITASI A

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagai bentuk pengakuan bahwa unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

perbaikan pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor.

Program tersebut melibatkan 20 kabupaten / kota yang dipilih untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perbaikan pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor. Target capaian yang ditetapkan KPK adalah 20 Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) mendapatkan akreditasi A yang semula masih dalam kategori B.

Dengan UPUBKB yang telah terakreditasi A, dapat dinyatakan bahwa unit pengujian kendaraan bermotor tersebut telah memenuhi standar pencegahan korupsi dimana indikator yang menjadi fokus perhatian adalah sudah menjalankan sistem pembayaran retribusi non tunai.

“Dalam laporan capaian kegiatan tersebut dapat disampaikan bahwa hasil capaian penilaian Tim Stranas PK atas aksi optimalisasi PNPB sektor pelayanan publik



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, didampingi Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan, Inspektur II Jujun Endah Wahyuningrum dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Termasuk Dalam Program STRANAS PK di Hotel Millenium Jakarta (30/1). Foto: HMS DJPD/MAD

pada UPUBKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 88% pada triwulan IV (b-24) dari sebelumnya sebesar 65% pada triwulan III (b-21),” jelas Dirjen Hendro.

Kata Dirjen Hendro lebih lanjut lagi, dari 20 UPUBKB yang menjadi proyek percontohan, berikut ini adalah 16 UPUBKB yang telah memenuhi target capaian periode tahun 2021-2022 sebesar 100% dengan memperoleh akreditasi A.

Adapun ke 16 UPUBKB tersebut yakni ada di bawah Dinas Perhubungan : Kota Pekanbaru, Kota Depok, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lombok Timur, Kota Makassar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kota Pontianak, Kota Palangkaraya, Kota Banjarmasin, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Tangerang dan Kota Palembang.

“Pencapaian ini bukan semata-mata upaya Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat, tentunya berkat kontribusi pemerintah daerah baik unsur kepala daerah maupun pelaksana teknisnya sudah melakukan upaya pemenuhan standar yang diminta oleh KPK dibawah pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenhub dan masing-masing inspektorat daerah,” jabarnya.

Dirjen Hendro melanjutkan, “Saya pribadi memberikan apresiasi

kepada daerah kabupaten kota yang berhasil meningkatkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dan mendapat akreditasi A dalam waktu kurang dari 24 bulan. Semoga ke depannya daerah kabupaten kota yang telah berhasil mendapatkan akreditasi A dapat menjaga kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta mempertahankan akreditasi A yang ada,” pungkasnya.*)



Petugas UPT PKB Dishub Kab Semarang sedang melakukan pengecekan kendaraan angkutan barang. UPT PKB Kab Semarang menjadi salah satu proyek percontohan UPUBKB yang telah memenuhi target capaian periode tahun 2021-2022 sebesar 100% dengan Akreditasi A.



Presiden RI Joko Widodo, didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Walikota Medan Bobby Afif Nasution, beserta pejabat terkait lainnya dalam peresmian Terminal Amplas Medan dan Terminal Tanjung Pinggir Pematang Siantar (9/2/2023). Foto: BKIP/Christanto

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meresmikan dua Terminal Tipe A di Sumatera Utara, yaitu Terminal Tipe A Amplas di kota Medan dan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir di kota Pematang Siantar. Peresmian kedua terminal tersebut, dilakukan di Terminal Tipe A Amplas, Medan, Kamis (9/2).

Presiden mengatakan, dengan beroperasinya kedua terminal ini diharapkan menumbuhkan budaya menggunakan angkutan massal, seperti bus. “Kita harapkan setelah beroperasi, betul-betul dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Kepala Negara.

Presiden mengungkapkan, masalah kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan kota lainnya menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk itu, pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi seperti terminal tipe A harus terus

PRESIDEN RI RESMIKAN DUA TERMINAL TIPE A DI SUMATERA UTARA

“Kita harapkan setelah beroperasi, betul-betul dapat memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Kepala Negara.

dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya. “Terminal harus bersih, nyaman. Kalau kotor, banyak preman, siapa yang mau naik bus,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden berharap, kota-kota lainnya di luar Jakarta

harus mulai membangun sarana dan prasarana transportasi massal. “Harus mulai berpikir ke arah membangun LRT, MRT, BRT, dan moda transportasi lainnya. Kalau tidak, akan keduluan macet, jalan tidak bisa dilebarkan, dan masyarakat sangat tergantung dengan kendaraan pribadi,” tuturnya.



Pada kesempatan yang sama, Menhub menjelaskan, dengan telah diselesaikannya revitalisasi kedua terminal di Sumatera Utara ini, diharapkan selain akan meningkatkan konektivitas antar wilayah perkotaan dan antar provinsi, juga dapat mendorong pariwisata, dan meningkatkan perekonomian daerah.

“Ini satu hal yang membanggakan, kota Medan memiliki fungsi konektivitas dalam kota dan luar kota yang terhubung dengan baik, karena kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta,” ucap Menhub.

Menhub menyebut, pembangunan kedua terminal tipe A di Sumatera Utara ini dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Terminal Amplas dibangun dengan pagu anggaran SBSN Rp 42,8 Miliar dan diselesaikan melalui skema tahun jamak (multiyears) tahun 2021-2022. Sementara, Terminal Tipe A Tanjung Pinggir dibangun menggunakan pagu anggaran SBSN Rp 43,4 Miliar dan telah diselesaikan pada tahun 2022.

“Saat ini, tanah di dua terminal ini sudah dibangun sebagian, dan

sebagian lagi akan dikembangkan menggunakan pendanaan kreatif bekerjasama dengan swasta. Semula tanah ini milik Pemkot kemudian diserahkan kepada Kemenhub dan akan dikembangkan dengan konsep multifungsi (mixed use),” lanjut Menhub Budi.

Dengan konsep multifungsi (*mixed use*), terminal tipe A tidak hanya memiliki fungsi sebagai simpul transportasi yang memiliki fungsi naik turun penumpang dan kedatangan keberangkatan bus, tetapi memiliki fungsi dan nilai tambah lainnya yaitu, sebagai pendorong dan penggerak perekonomian dan sebagai pusat kegiatan sosial, seni dan budaya.

Pengoperasian kedua terminal tipe A tersebut dikelola BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Terminal Tipe A Amplas memiliki luas lahan total 20.162 m2, terminal seluas 15.037 m2 dan lahan kosong seluas 5.125 m2 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berupa

Dengan telah diselesaikannya revitalisasi terminal ini, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah perkotaan dan antar provinsi, juga dapat mendorong pariwisata, serta meningkatkan perekonomian daerah.

Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Adapun fasilitas yang dimiliki meliputi gedung terminal, mess karyawan, ruang istirahat sopir, lahan parkir, dan toko-toko.

Terminal Amplas Medan memberikan layanan bus AKAP/AKDP yang masuk rata-rata 12.344 bus/tahun dengan jumlah penumpang rata-rata 85.271 penumpang/tahun. Terminal Amplas melayani 32 trayek AKAP dengan 602 armada; 25 trayek AKDP dengan 395 armada; 3 trayek Angkot dengan 232 armada; dan 2 trayek Trans Metro Deli dengan 35 armada serta telah dilakukan kerjasama berupa sewa *tenant/kios*.

Sementara itu, revitalisasi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir Pematang-siantar memiliki luas lahan terminal 32.891 m2 dan lahan seluas 13.156 m2 yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Adapun Fasilitas yang dimiliki meliputi gedung terminal, mess karyawan, ruang istirahat sopir, lahan parkir, dan toko-toko.

Terminal Tipe A Tanjung Pinggir memberikan layanan bus AKAP/AKDP dengan jumlah rata-rata 4.322 bus/tahun dan 35.690 orang penumpang/tahun. Terminal melayani 14 trayek AKAP dengan 58 armada; 20 trayek AKDP dengan 38 armada; 17 trayek Angkutan Perkotaan dengan 24 armada serta telah dilakukan Kerjasama Pemanfaatan *tenant/kios*.

Turut hadir dalam peresmian, Menteri Sekretariat Negara Pratikno; Menteri BUMN Erick Thohir; Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi; Walikota Medan Bobby Afif Nasution; Walikota Pematang Siantar Susanti Dewayani; dan segenap Forkopimda di Provinsi Sumatera Utara.(*)





kegiatan sebelum dilaksanakan penegakan hukum yang lebih komperensif dan menyeluruh.

Pentahapan penanganan Zero ODOL meliputi sosialisasi dan edukasi, optimalisasi kinerja UPPKB, optimalisasi kinerja Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (KIR Kendaraan), penegakan hukum melalui penerapan sanksi peringatan dan tilang. Terhadap angkutan yang melakukan pelanggaran tata cara pemuatan yang membahayakan keselamatan dilakukan Penengguhan Perjalanan dan transfer muatan. Tahap selanjutnya adalah penindakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



Hendro Sugiatno
Dirjen Perhubungan Darat

“Pelaksanaan Zero ODOL 2023 akan memperhatikan situasi sesuai kebutuhan dan memperhatikan kondisi ekonomi, sosial dan politik di dalam negeri,” kata Dirjen Hendro.

Fenomena pelanggaran *Over Dimension Over Loading* (ODOL) dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat baik terkait aspek keselamatan maupun kerusakan jalan yang memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit. Disamping itu dampak ODOL juga membuat kerusakan sarana dan prasarana lainnya seperti kerusakan kapal penyeberangan dan jembatan. Kasus kecelakaan yang melibatkan truk ODOL atau kelebihan muatan dan dimensi sudah banyak terjadi, bahkan di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit.

kepentingan terkait baik dari instansi pemerintah, Kepolisian, dan stakeholder terkait dalam menyusun tahapan kegiatan dan rencana aksi penanganan Zero ODOL yang akan dilaksanakan mulai tahun 2023.

Untuk pelaksanaan Zero ODOL pada tahun 2023 perlu dilakukan pentahapan terlebih dahulu mengingat pada tahun 2022 pelaksanaan penegakan hukum terkendala oleh situasi sosial dan ekonomi seperti adanya kelangkaan minyak goreng di awal tahun 2022 dan gejala para pengemudi truk sehingga perlu dilakukan pentahapan awal melalui pemantapan beberapa

KOLABORASI ANTAR INSTANSI OPTIMALKAN PENANGANAN KENDARAAN ODOL

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) masih saja terjadi. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi lintas sektoral agar penanganan ODOL lebih optimal dan dapat dilaksanakan secara utuh di lapangan serta dengan resiko yang minimal.

Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan *focus group discussion* (FGD) “Roadmap Zero ODOL” pada Selasa (24/01) di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang, Banten, mengatakan bahwa, “Pada hari ini kami mengundang Bapak/Ibu sekalian dalam kegiatan ini untuk memberikan masukan dan *support* terhadap pelaksanaan penanganan Zero ODOL yang akan dilaksanakan mulai tahun 2023 ini.”

Hendro menyatakan bahwa Ditjen Hubdat saat ini perlu masukan dan kritik dari para pemangku



Focus Group Discussion Roadmap Zero ODOL di Tangerang, Banten, 24/1/2023. Hadir dalam kegiatan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah, Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Ery Nursatari, perwakilan KemenPUPR, serta para pengamat transportasi antara lain Agus Pambagio, Darmaningtyas, dan Djoko Setijowarno. Foto: HMS DJPD/MAD

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Ery Nursatari, mengungkapkan bahwa Zero ODOL dapat terlaksana jika terdapat kesinambungan dari berbagai pihak. “Ini (Zero ODOL) bisa terlaksana, tinggal tugas kita bersama, baik pengusahanya, pengemudinya kemudian dari sektor ekonomi juga kita harus berkesinambungan, kemudian kita juga berharap semua bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan kita untuk menciptakan keamanan keselamatan di jalan bisa terlaksana,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah mengatakan bahwa dalam penanganan ODOL, UPPKB cukup efektif dan masih dibutuhkan dalam penindakan, namun mengalami beberapa keterbatasan. Hal tersebut

dapat diatasi dengan adanya pemasangan alat WIM (*Weigh in Motion*) yang sudah terpasang di 3 (tiga) lokasi UPPKB yaitu Losarang, Balonggandu, dan Kulwaru.



Brigjen Pol Ery Nursatari
Dirkamsel Korlantas Polri

“WIM kita yang sudah terpasang di ruas jalan, kalau kita katakan 100 truk yang melintas sekitar 70% sudah terdeteksi tidak melanggar. Nah yang 30% ini yang kita masukkan dan yang kita urus, hal ini sangat membantu mengurangi resiko petugas kita di lapangan,” kata Popik.

Di akhir kegiatan, Dirjen Hendro mengatakan bahwa hasil FGD Roadmap Zero ODOL ini masih akan dikembangkan dan didiskusikan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan lain agar Zero ODOL dapat segera direalisasikan.

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk menampung pokok pikiran, pandangan, dan/atau masukan

dari para narasumber dan pembahas dalam penyusunan roadmap Zero ODOL yang minimal berisikan pentahapan pelaksanaan Zero ODOL.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirulloh, perwakilan KemenPUPR, serta para pengamat transportasi antara lain Agus Pambagio, Darmaningtyas, dan Djoko Setijowarno.

Selain itu hadir juga sejumlah narasumber seperti Dewan Pimpinan Pusat ORGANDA Drs. Suripno, MsTr, Kepala Lembaga Pengembangan Transportasi dan Logistik ITI Trisakti Abdullah Ade Suryobuwono, S.Si, MT, Ketua Transco Lilik Wachid Budi Susilo, Wakil Ketua Majelis Profesi dan Etik (MPE), Wakil Ketua Majelis Profesi dan Etik (MPE) Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Muhamad Isnaeni, perwakilan INDEF Ariyo Dharma Pahla Irahmana, dan Ketua Program Studi IB Ilham Malik.*



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, bersama Kakorlantas Polri Firman Shantyabudi, Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono dan pejabat terkait lainnya di sela pengecekan Jalur Tol Trans Jawa, Purwakarta, 23/2/2023. Foto: HMS DJPD/TLE

CEK JALUR MUDIK PERSIAPAN LEBARAN

Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023, Kemenhub bersama instansi terkait melakukan sejumlah kegiatan antara lain pengecekan jalur pantai selatan Jawa, jalur tengah, dan jalur tol trans Jawa.

Pengecekan Jalur Pansela Kemenhub bersama instansi terkait melakukan kegiatan pengecekan Jalur Pantai Selatan (Pansela) wilayah Provinsi Banten – Provinsi Jawa Barat – Provinsi Jawa Tengah – Provinsi D.I. Yogyakarta. Peninjauan lapangan dilakukan oleh Dirjen

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiarno, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR Akhmad Cahyadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, dan Direktur Operasional PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, Kamis (19/1).

Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno mengatakan bahwa kegiatan pengecekan jalur pansela ini juga merupakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa jalur pansela dapat digunakan sebagai jalur alternatif ketika jalan tol atau jalur pantura mengalami kepadatan. “Ketika jalan tol menuju wilayah timur padat dan macet, maka jalur Pansela bisa dijadikan alternatif mudik,” kata Hendro.

Dari peninjauan langsung dapat ditemukan sejumlah alasan mengapa jalur Pansela kurang begitu diminati pemudik, yaitu karena minimnya penerangan jalan, kurangnya rambu-rambu yang bisa membahayakan pengendara dan minimnya *rest area* serta SPBU.

“Kita akan kebut pembangunan fasilitas keselamatan jalan untuk penerangan jalan dan perambuan. Mudah-mudahan pembangunannya selesai sebelum musim mudik lebaran,” ujar Hendro.



Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, Direktur Lalu Lintas Cucu Mulyana, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR Akhmad Cahyadi, Kakorlantas Polri Firman Shantyabudi ketika melakukan Pengecekan Jalur Pantai Selatan (19/1/2023). Foto: HMS DJPD/WBW

Pengembangan Potensi Wisata di Jalur Pansela

Kementerian Perhubungan akan mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi pariwisata pantai agar dapat menghidupkan jalur Pantai Selatan Jawa.

Menurut Hendro, jalur Pantai Selatan di wilayah provinsi Jawa Barat dari Pelabuhan Ratu (Sukabumi) sampai Pangandaran yang memiliki 13 pantai indah yang sangat potensi untuk dikembangkan.

“Kita akan dorong Kemenparekraf dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada, supaya masyarakat berminat melewati jalur ini,” kata Hendro.

“Nah ketika jalur Pansela Jawa ini ramai digunakan,” lanjut Hendro, “Secara otomatis akan menumbuhkan minat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena pantai-pantai di jalur Pantai Selatan view nya sangat luar biasa indahnya,” imbuhnya.

Siapkan Evaluasi dan Rekomendasi Jalur Pansela

Setelah melakukan pengecekan jalur pantai selatan Jawa, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR dan Korlantas Polri akan melakukan evaluasi untuk memutuskan apakah jalur tersebut dapat digunakan sebagai jalur mudik lebaran tahun 2023.

Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Cucu Mulyana se usai melakukan peninjauan ruas jalur pantai selatan dari Pangandaran Jawa Barat hingga Bantul Yogyakarta, Sabtu (21/1).

Tim cek jalur pantai selatan Jawa yang melewati Provinsi Banten-Jawa Barat-Jawa Tengah sampai Yogyakarta telah menyelesaikan tinjauan lapangannya.

Cucu mengatakan, “Secara umum, jalur tersebut bisa dilalui untuk mudik lebaran atau pada liburan sekolah serta libur Natal dan tahun baru, meski masih ada beberapa ruas jalan yang harus menjadi perhatian kita bersama.”

Dengan pelaksanaan cek jalur

bersama Korlantas dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, kita semakin tahu kondisi yang sesungguhnya jalur tersebut.

Secara kasat mata kita sudah bisa tahu apa saja yang menjadi kebutuhan dan tanggung jawab siapa. Misalnya seperti lampu penerangan jalan, lampu delineator, guardrail dan dalam satu minggu ini akan kita hitung berapa banyak kebutuhan rambu lalu lintas sepanjang jalur pantai selatan jawa.

Ada ruas jalan yang belum direkomendasikan untuk mudik yaitu pada ruas jalur Cilacap hingga Kebumen sepanjang 15 kilometer karena medannya terlampau ekstrim.

Pengecekan Jalur Arteri Pantura Survey jalur utama pada Jalur Arteri Pantura dilaksanakan pada awal Februari, melintasi beberapa wilayah mulai Bekasi sampai dengan Semarang.

Kegiatan ini sebagai langkah antisipasi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi pada saat arus Mudik

dan arus balik Lebaran, dari peninjauan ditemukan 7 titik pembangunan perbaikan jembatan di jalur Pantura dan untuk kondisi jalan nasional masih dalam kondisi baik.

Survei jalur Pantura dilaksanakan bersama Dirjen Bina Marga, Direktur Kamsel Korlantas Polri dan Direktur

Pengecekan Jalur Tol Trans Jawa Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengecek kesiapan jalan tol menjelang masa Angkutan Lebaran 2023/1444 H dengan melakukan koordinasi bersama Korlantas Polri, Kementerian PUPR, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), serta PT Jasa Raharja (Persero).

Pada Kamis (23/2), Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam pantauannya dari Jakarta menuju Semarang menyampaikan optimisme dalam menyiapkan angkutan lebaran yang lebih baik. Dengan besarnya animo masyarakat untuk mudik karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah ditiadakan, diperlukan

sistem manajemen rekayasa lalu lintas yang serius.

“Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya di jalan tol, *rest area* adalah salah satu sumber kemacetan apabila manajemen *traffic*-nya tidak dikelola dengan baik,” ujar Dirjen Hendro.

Lebih lanjut, ia menuturkan rekayasa lalu lintas yang diterapkan harus bisa menghindari atau mengurangi kepadatan di titik-titik yang rawan kemacetan. Bahkan, untuk mengurangi tingkat kemacetan dan kecelakaan diharapkan masyarakat bisa memaksimalkan Program Mudik Gratis 2023.

Direktur Operasional PT Jasa Marga (Persero), Fitri Wiyanti memaparkan prediksi volume lalu lintas saat Arus Mudik melalui 4 Gerbang Tol Utama diperkirakan sebesar 2,21 juta kendaraan, naik 2,8% terhadap Lebaran 2022 (2,15 juta) atau naik 8,44% terhadap Lebaran 2019 (2,04 juta).

“Sedangkan untuk Arus Balik, diprediksi H1 s.d H+10 melalui 4 Gerbang Tol Utama sebesar 2,32 juta kendaraan naik 1,4% terhadap Lebaran 2022 (2,29 juta) atau

naik 5,4% terhadap Lebaran 2019 (2,19 juta),” papar Fitri.

Adapun, terdapat beberapa titik kepadatan yang mendapat perhatian khusus di antaranya :

1. Ruas tol Jakarta-Cikampek (KM 47 s.d KM 66, KM 70 s.d KM 72);
2. Ruas tol Cikampek – Palimanan (KM 72 s.d KM 188) dan beberapa lokasi Rest Area;
3. Ruas tol Palimanan – Kanci (KM 189 s.d KM 214).

Untuk mendukung penyelenggaraan Angleb 2023, BPJT dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan mengoperasikan 58 Rest Area di kedua ruas jalur tol sebagai tempat istirahat dan pelayanan bagi para pemudik.

Pengendalian Arus Lalu Lintas

Terkait dengan pengendalian arus lalu lintas, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan akan memberlakukan pengalihan arus jika terjadi kepadatan saat arus mudik di beberapa ruas tol dan akan menerapkan skema *contra flow* jika terjadi kepadatan pada arus balik.

“Akan dilakukan beberapa skema rekayasa lalin jika terjadi kepadatan. Personil yang bertugas pun akan mengantisipasi lebih awal



agar kendaraan tidak berhenti di bahu jalan, serta akan dilakukan buka-tutup *rest area* secara situasional jika sudah melebihi kapasitas,” jelas Latif.

Sejalan dengan itu, rekayasa lalin berupa *contra flow* ataupun *one way* juga akan diterapkan di ruas tol wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah apabila situasi kepadatan jalan sudah memasuki situasi padat dan kontingensi.

Khusus di *rest area*, Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi mengimbau, “Perlu dilakukan pengaturan alur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di pintu masuk sehingga menyebabkan kemacetan di jalan tol”.

Di samping itu, Sekretaris Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Yongki Triono mengatakan bahwa saat arus mudik dan balik Lebaran 2023 nanti, Tol Cisumdawu akan dioperasikan secara fungsional sepanjang 60 km sebagai alternatif jalan tol dari Bandung menuju Kertajati ataupun sebaliknya.

“Kemungkinan besar Tol Cisumdawu sudah bisa beroperasi fungsional saat mudik Lebaran nanti sehingga bisa jadi alternatif jalan tol bagi pemudik. Kemudian,



Atas: Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno bersama Kakorlantas Polri Firman Shantyabudi memberikan keterangan pers di sela pengecekan jalur Pantai Selatan Jawa, 19/1/2023. Foto: HMS DJPD/BYU.

Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana didampingi Kepala BPTD Jateng-DIY Eko Agus Susanto memberikan keterangan pers di sela pengecekan jalur Pansela, 20/1/2023. Foto: HMS DJPD/BYU.

untuk pelebaran jalan di ruas tol Cikampek pun ditargetkan akan selesai 2 minggu sebelum lebaran,” kata Yongki.

Turut hadir dalam pantauan ruas jalan tol Jakarta hingga Semarang Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), Rivan Achmad Pur-

wantono, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Budi Harimawan, Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, serta Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Ery Nursatari.(*)





Suasana Posko Validasi Mudik Gratis Ditjen Perhubungan Darat di Terminal Kayuringin Bekasi (14/3/2023).

MASYARAKAT ANTUSIAS DAFTAR MUDIK GRATIS DITJEN HUBDAT

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiapkan sebanyak 585 unit bus pada program Mudik Gratis 2023 sebagai upaya untuk menekan angka penggunaan sepeda motor oleh para pemudik. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarno, pada kegiatan Press Conference Mudik Gratis Angkutan Lebaran 2023, Senin (13/03).

“Kami berharap dengan adanya program Mudik Gratis Kemenhub ini dapat mencegah masyarakat untuk mudik dengan sepeda motor karena dapat berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas,” kata Dirjen Hendro.

Tahun ini, Ditjen Hubdat menyediakan sebanyak 24.072 kuota mudik gratis yang terdiri dari 18.528 orang untuk arus mudik dengan 459 bus dan 5.544 orang untuk arus balik dengan 126 bus. Selain itu, Ditjen Hubdat juga kembali menyediakan kuota untuk pengangkutan motor dengan truk secara gratis.

“Total kuota pengangkutan mudik sepeda motor sebanyak 900 unit, yang terbagi menjadi 450 unit untuk arus mudik dan 450 unit untuk arus balik yang diangkut dengan 30 unit truk (15 unit truk

mudik dan 15 unit truk balik),” tutur Dirjen Hendro.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan, Suharto menyampaikan bahwa Kota Tujuan Mudik dan Balik tahun ini sebanyak 28 kota yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, serta wilayah Sumatera.

Secara rinci, 3 kota tujuan di Jawa Barat yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Kemudian Provinsi Jateng- DIY sebanyak 18 Kota yaitu Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, dan Yogyakarta. Selanjutnya 5 kota di Provinsi Jawa Timur yaitu Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung. Dan terakhir wilayah Sumatera 2 Kota yaitu Lampung dan Palembang.

“Sementara untuk kota keberangkatan/asal arus balik terdapat 8 kota yaitu Solo, Cirebon, Madiun, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Wonogiri, Yogyakarta. Sedangkan untuk lokasi tujuan Mudik dan Balik bagi pengangkutan Sepeda Motor sebanyak 5 kota yaitu Solo, Semarang, Purwokerto, Wonogiri, Yogyakarta,” ungkap Suharto.



Adapun penyerahan sepeda motor untuk kegiatan arus mudik dilaksanakan pada hari Minggu, 16 April 2023 di Terminal Tipe A Pondok Cabe Tangerang Selatan dan akan diberangkatkan pada hari Senin 17 April 2023.

“Untuk pemberangkatan penumpang arus mudik akan diberangkatkan dari 5 Terminal yaitu Terminal Pulogebang Jakarta, Terminal Tipe A Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan Terminal Tipe A Jatijajar Depok, pada tanggal 18 April 2023. Sementara untuk Terminal Kampung Rambutan Jakarta dan Terminal Tipe A Poris Plawad pada tanggal 19 April 2023,” lanjutnya lagi.

Selanjutnya, ia mengatakan untuk pemberangkatan arus balik pengangkutan sepeda motor pada Kamis 27 April 2023 dari 5 terminal tipe A yaitu kota Solo, Semarang, Purwokerto, Wonogiri dan Yogyakarta. Sedangkan pemberangkatan arus balik penumpang pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 dari 8 terminal tipe A kota asal keberangkatan yaitu Solo, Cirebon, Madiun, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Wonogiri, Yogyakarta.

Antusiasme Masyarakat

Kemudian pada saat Media Briefing bertema “Persiapan Angkutan Lebaran: Update Penyelenggaraan Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2023” di Jakarta, Jumat (24/3), Suharto menjelaskan, sejak dibuka pendaftarannya pada 13 Maret 2023 lalu, saat ini pendaftarannya sudah ditutup karena kuota yang tersedia sudah terpenuhi. Total kuota yang disediakan yaitu sebanyak 24.072 penumpang dengan 585 unit bus.

Namun demikian, Suharto mengungkapkan, masih ada kemungkinan pendaftaran dibuka kembali jika ada pendaftar yang tidak melakukan validasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Jika yang daftar tidak melaksanakan validasi, maka dianggap batal,” tuturnya.*

ANGKUTAN

BAHAS TRANSPORTASI CERDAS, DITJEN HUBDAT GELAR WEBINAR SHARING SESSION



Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar “Knowledge Sharing On Intelligent Transportation System and Trucking Regulation” pada Kamis (16/02) malam. Diselenggarakan dalam format webinar, acara ini mengundang pembicara dari *United States Department of Transportation* dan sejumlah praktisi transportasi internasional. Secara umum, webinar ini mendiskusikan mengenai sistem transportasi cerdas dan juga regulasi angkutan barang terutama dalam mencegah adanya truk ODOL di Indonesia.

Dalam sambutan pembukanya, Direktur Angkutan Jalan, Suharto menyatakan bahwa melalui agenda ini diharapkan diperoleh sejumlah masukan dan input terkait sistem transportasi cerdas serta mengenai regulasi truk. “*Intelligent Transportation System (ITS)* atau sistem transportasi cerdas merupakan elemen penting dalam manajemen transportasi dan selalu menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Di Indonesia, sistem ini tertuang dalam Permenhub nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” kata Suharto.

Menurut Suharto, kemacetan merupakan isu global yang kerap mendapat perhatian akhir-akhir ini salah satunya akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan dan ketersediaan jalan. Salah satu tujuan diadakannya webinar ini, menurut Suharto juga sebagai salah satu wadah untuk bertukar pikiran dalam pengelolaan sistem transportasi

cerdas di Indonesia maupun Amerika Serikat.

“Peningkatan jumlah pembangunan jalan termasuk jalan tol di Jakarta dan sekitarnya menjadi contoh bahwa jumlah jalan tidak proporsional sesuai dengan kenaikan jumlah kendaraan. Hal ini menyebabkan kemacetan terutama di jam-jam sibuk,” tambah Suharto.

Untuk mengatasi masalah kemacetan tersebut, menurut Suharto, perlu ada inovasi terbaru dalam bidang IT yang dapat menciptakan fasilitas maupun infrastruktur transportasi yang lebih informatif, aman, nyaman, berkelanjutan, serta mendorong penggunaan transformasi digital di Indonesia.

Di sisi lain, Elly Sinaga selaku Presiden dari Indonesia *Road Safety Partnership (IRSP)* menjelaskan bahwa penerapan penggunaan sistem transportasi cerdas di Indonesia salah satunya melalui ATCS telah dilakukan di lebih dari 100 kota se Indonesia serta sistem pembayaran jalan tol tanpa kartu atau *multi lane free flow*.*

PRASARANA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI ACEH PACU PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN WISATA



Pembangunan infrastruktur transportasi oleh pemerintah di Provinsi Aceh dan sekitarnya diharapkan dapat memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (8/2).

Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon mulai direvitalisasi pada tahun 2021 dan telah diselesaikan pada tahun 2022, menggunakan APBN sebesar Rp 20 miliar.

Terminal ini memiliki luas sekitar 9.792 m2 dan melayani tujuan Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Adapun fasilitas terminal meliputi area pengendapan bus, jalur kedatangan bus, jalur keberangkatan bus, ruang tunggu penumpang, kantor pengelola dan area komersial.

“Alhamdulillah, saya sudah mengunjungi Terminal Tipe A di Takengon dan Bandara Rembele (Kabupaten Bener Meriah). Tempatnya indah, udaranya sejuk, dan potensinya banyak. Ada banyak potensi situs dan bangunan indah, tadi saya usul ke Pak Pj. Bupati agar direnovasi untuk tempat wisata” kata Menhub.

Jumlah rata-rata kendaraan bus AKAP yang datang dan berangkat dari Terminal Tipe A Paya Ilang sebanyak 5 bus/hari dan jumlah penumpang bus AKAP rata-rata 107 Orang/hari. Sedangkan rata-rata kendaraan AKDP yang datang dan berangkat adalah 23 Kendaraan/

hari dan jumlah penumpang AKDP rata-rata adalah 142 orang/hari.

Pembangunan Terminal Paya Ilang Takengon diharapkan memperlancar arus konektivitas penumpang antar provinsi maupun wilayah; meningkatkan pertumbuhan perekonomian; dan mendukung sektor pariwisata setempat seperti Pantai Terong, Pantai Menye, Danau Lut Tawar, Goa Loyang Koro, Air Terjun Mengaya, Kopi Arabica Gayo.

Lebih lanjut, Menhub Budi menyampaikan rencana pembangunan *dry port* diatas lahan seluas 4 hektar dengan kolaborasi antara Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam, Pemkab Bener Meriah, dan Pemkab Aceh Tengah. Selain itu, Menhub mendorong Forkopimda agar menggali potensi pariwisata tanah Gayo.

Turut hadir dalam peninjauan, Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiarno, Anggota Komisi V DPR RI Ilham Pangestu, Pj. Walikota Langsa Said Mahdum Majid, Pj. Bupati Aceh Tengah T. Mirzuan, dan Pj. Bupati Kabupaten Bener Meriah Haili Yoga.*

SARANA

KEMENHUB BAHAS RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DENGAN KSP



Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyampaikan sejumlah Progres dalam Realisasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan dan Angkutan Jalan. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh menerima audiensi dengan sejumlah Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) pada Selasa (03/01).

“Dalam pertemuan hari ini tindak lanjut menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai tanggung jawab pilar yang diemban Kementerian Perhubungan. Saat ini ada sejumlah hal yang menjadi isu strategis keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia di mana setara dengan 3-4 orang meninggal setiap jamnya,” ujar Amirulloh.

Angka fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi ini juga dinilai berpengaruh terhadap kesejahteraan. Dalam audiensi ini juga disampaikan arah penyelenggaraan RUNK LLAJ 2021-2040 yang mengusung visi “Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terbaik di Asia Tenggara melalui Penciptaan Sistem Berkeselamatan, Penguatan Koordinasi, dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi”.

Sementara misi yang diangkat dalam RUNK 2021-2040 yaitu:

1. Mengarusutamakan keselamatan LLAJ menjadi prioritas nasional;
2. Membudayakan penyelenggara-

- raan LLAJ yang mengutamakan keselamatan;
3. Mensinergikan segala potensi guna memaksimalkan kinerja KLLAJ.

“Dengan demikian diharapkan adanya RUNK 2021-2040 dapat memberikan panduan/pedoman bagi pemangku kebijakan agar dapat melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program KLLAJ, serta menjadi acuan bagi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan KLLAJ di sektor dan wilayah tanggungjawabnya,” kata Amirulloh.

Lebih lanjut lagi, Amirulloh menjelaskan poin pembahasan audiensi dengan KSP hari ini ada 4 yaitu:

1. Realisasi Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ;
2. Indikator capaian rencana aksi;
3. Kendala/hambatan dalam penyusunan RAK LLAJ terutama antar instansi;
4. KSP meminta data dukung terkait pelaksanaan RAK LLAJ.*)

menuntut kecepatan pelayanan maupun transparansi kita. Jangan sampai kita termakan arus itu sendiri,” imbau Dirjen Hendro.

la mengajak seluruh personil di Ditjen Hubdat untuk memanfaatkan anggaran dengan tepat. “Kreasi dan inovasi selama dapat dipertanggungjawabkan akan lebih bagus sehingga dapat melihat peluang-peluang yang menarik masyarakat untuk berperan serta juga mengembangkan industrinya,” tambah Dirjen Hendro.

la meyakini bahwa hal tersebut dapat dijalankan selama mau berkomitmen dan keluar dari zona nyaman. Di lingkungan Ditjen Hubdat, ada sejumlah isu strategis yang akan diangkat pada TA 2023, antara lain:

1. Penegakan hukum kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL);
2. Evaluasi pelaksanaan *Buy The Service* subsidi angkutan perkotaan;
3. Pengelolaan Terminal dan JTI;
4. Peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
5. Integrasi TIK Bidang Perhubungan Darat dan digitalisasi;
6. Penyelesaian Hibah BMN Perhubungan Darat.*)

“Semua hal harus dipermudah, kecepatan pelayanan harus nomor satu. Internal pemerintahan juga mendorong untuk percepatan pelayanan, masyarakat

nyelesaikan renstra di tahun 2024. Saya berterima kasih bagi rekan-rekan satker yang telah melakukan penyerapan anggaran dengan maksimal,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiarto dalam arahannya pada acara tersebut.

la menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBN 2023, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, terdapat 5 fokus yaitu:

1. Penguatan kualitas SDM unggul dan produktif, inovatif dan berdaya saing;
2. Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi;
3. Pemantapan efektifitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;
4. Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi;
5. Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.

UMUM

GELAR PEMBEKALAN SATKER, DITJEN HUBDAT EVALUASI ANGGARAN 2022 DAN BAHAS PELAKSANAAN ANGGARAN 2023



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengevaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dan membahas persiapan dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2023 melalui kegiatan “Pembekalan Satker Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023” pada Selasa (10/01) di Le Meridien Hotel, Jakarta.

“Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bekerja dengan baik. Untuk Tahun Anggaran 2022, Hubdat dapat mencapai 98% ini melampaui prognosa. Pencapaian ini jangan menjadi anggaran yang tidak bermanfaat dan tidak adanya nilainya. Kita masih ada sisa waktu 2 tahun untuk me-

LALU LINTAS

PERGERAKAN MASYARAKAT SELAMA LEBARAN 2023 DIPREDIKSI MENINGKAT KEMENHUB SIAPKAN LANGKAH ANTISIPASI



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hasil survei potensi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 (Idul Fitri 1444 H) yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Berdasarkan hasil survei tersebut, diprediksi pergerakan masyarakat mencapai 123,8 juta orang.

Jumlah ini meningkat 14,2 % jika dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat di masa Lebaran tahun 2022 lalu yang mencapai 85,5 juta orang.

“Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Baik berupa penyediaan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, manajemen rekayasa lalu lintas, dan kebijakan lainnya agar penyelenggaraan mudik tahun ini dapat berjalan dengan selamat, aman, dan terkendali,” ujar Menhub di Jakarta, Senin (6/3).

Menhub menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik tahun ini diantaranya yaitu: tidak adanya PPKM, memasuki masa pra endemi atau mendekati normal pasca pandemi Covid-19, perekonomian yang semakin membaik, tidak ada pembatasan atau larangan perjalanan, dan persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2022 lalu.

“Penanganan arus mudik dan balik pada Lebaran tahun ini sangat menantang. Maka itu kami telah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun. Selain itu, evaluasi dari penyelenggaraan mudik serta Natal dan tahun baru sebelumnya menjadi bekal penting sebagai pelajaran agar tahun ini bisa lebih baik lagi,” tutur Menhub.*)

PRASARANA

DITJEN HUBDAT - PEMKAB BANYUMAS TANDATANGANI PERJANJIAN PINJAM PAKAI TERMINAL TIPE A BULUPITU



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada hari ini, Rabu (22/02) mengadakan penandatanganan perjanjian pinjam pakai lantai dua Terminal Tipe A Bulupitu. Proses penandatanganan ini dilakukan antara Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh dengan Bupati Banyumas, Achmad Husein di Terminal Tipe A Bulupitu, Purwokerto.

“Kami mendorong agar Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi aset kami dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar lagi. Aset bisa dimaksimalkan penggunaannya jadi pemanfaatan ini telah kami lakukan di beberapa lokasi termi-

PRASARANA

LAYANAN SAMSAT HADIR DI TERMINAL TIPE A LEUWIPANJANG BANDUNG



Ditjen Hubdat Kemenhub dengan Pemprov Jawa Barat melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara (BMN) lantai dua Terminal Tipe A Leuwipanjang yang akan dipergunakan sebagai Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pada Senin (27/3).

“Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupaya senantiasa untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan

nal maupun pelabuhan penyeberangan termasuk sebelumnya dengan Pemkot Semarang,” ujar Amirulloh dalam sambutannya pada kegiatan itu.

Melalui perjanjian pinjam pakai ini, nantinya sebagian Terminal Tipe A Bulupitu di lantai dua akan digunakan sebagai ruang pelayanan pajak dan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.

“Kegiatan ini sudah ada berpedoman pada Permenkeu Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Tujuannya agar terminal ini bisa lebih optimal lagi jadi nanti dengan adanya aktivitas di sini kami berharap terminal akan semakin ramai dan menjadi magnet serta pusat pergerakan masyarakat,” tambah Amirulloh.

Dalam sambutannya, Amirulloh juga menyambut baik kehadiran Bapenda Kabupaten Banyumas di Terminal Bulupitu sehingga masyarakat yang akan mengurus kebutuhannya juga dapat sekaligus mengunjungi dan mengenal terminal. Ia juga berharap agar seluruh pengguna terminal baik Pemda maupun masyarakat dapat sama-sama menjaga kebersihan dan merawat kondisi terminal yang saat ini dalam kondisi bagus.*)

BMN, salah satunya bersinergi dengan pemerintah daerah berupa pinjam pakai aset Kementerian Perhubungan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Samsat,” ujar Amirulloh dalam sambutannya pada kegiatan itu.

Proses penandatanganan dilakukan antara Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wongsatmaja di Terminal Tipe A Leuwipanjang, Bandung.

Melalui perjanjian pinjam pakai yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ini, sebagian Terminal Tipe A Leuwipanjang di lantai dua akan digunakan sebagai Samsat dan sebagian lantai 1 digunakan untuk mengurus pajak 5 tahunan. “Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat membuat ramai Terminal. Ini pertama kalinya ada Samsat di Terminal sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraannya,” tutur Amirulloh.*)

Jumlah pemudik yang akan melakukan perjalanan dari Pulau Jawa menuju Sumatera diprediksi meningkat, oleh karena itu Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tengah menyiapkan Pelabuhan Ciwandan Banten untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak selama masa Angkutan Lebaran 2023. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno pada Senin (13/03).

“Pelabuhan Ciwandan bukan alternatif, tapi akan beroperasi bersamaan dengan pelabuhan penyeberangan lainnya selama mudik lebaran, khususnya bagi pengguna sepeda motor dan truk logistik. Di sana akan dilayani dengan lintasan Ciwandan-Bakauheni untuk arus mudik dan Ciwandan-Panjang untuk arus mudik-balik,” ujar Dirjen Hendro.

Pada lintasan Ciwandan-Bakauheni akan dilayani oleh sebanyak 12 unit kapal RoRo, sedangkan lintasan Ciwandan - Panjang akan dilayani oleh 3 unit kapal milik PT. Pelni dan PT. ALP.

Adapun, akan dialokasikan sebanyak 5 dermaga di Pelabuhan Ciwandan di antaranya dermaga 02, dermaga 03, dermaga 05A, 06 dan juga 07 dengan rencana 24 trip/hari. Sementara itu, dermaga yang beroperasi di Pelabuhan Merak sebanyak 7 dermaga yang akan dilayani dengan total 65 kapal RoRo.

“Nantinya kendaraan Roda 4 dan bus akan menggunakan Pelabuhan Merak untuk arus mudik dan Bakauheni untuk arus balik, terpisah dengan kendaraan Roda 2 dan truk agar tidak terlalu padat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ia menambahkan, pengalihan sepeda motor dan truk ke Pelabuhan Ciwandan akan dilakukan secara sistem melalui



Sejumlah sepeda motor dan kendaraan roda empat keluar dari kapal penyeberangan di dermaga Pelabuhan Penyeberangan Merak Banten (29/4/2023).

URAI KEPADATAN DI PELABUHAN MERAK, KEMENHUB SIAPKAN PELABUHAN CIWANDAN

aplikasi Ferizy sehingga penjualan tiket khusus sepeda motor dan truk logistik hanya ada pilihan melalui lintas Ciwandan-Bakauheni dan Ciwandan-Panjang.

“Diharapkan dengan beroperasinya Pelabuhan Ciwandan dapat mengurangi waktu tunggu pengguna sepeda motor untuk diangkut masuk ke kapal penyeberangan,” pungkasnya.

Pembelian Tiket Penyeberangan Melalui Ferizy

Untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman para pemudik yang menggunakan angkutan penyeberangan, Dirjen Hendro pun mengimbau masyarakat untuk membeli tiket secara daring (online) melalui Ferizy baik saat mudik maupun balik.

“Kepada masyarakat saya sarankan untuk membeli tiket penyeberangan melalui aplikasi Ferizy dan kalau bisa beli tiket lebih awal atau jauh-jauh hari sebelum hari keberangkatan,” imbau Dirjen Hendro.

Adapun tahapan untuk membeli tiket melalui Ferizy yaitu:

1. *Download* aplikasi Ferizy di *Smartphone* atau melalu *website ferizy.com*
2. Pilih jadwal keberangkatan
3. Isi data diri dengan lengkap
4. Lakukan pembayaran
5. Elektronik Tiket akan dikirimkan ke email
6. Tunjukkan Elektronik Tiket pada petugas di pelabuhan dan akan ditukar dengan *boarding pass*.

“Kalau sudah memegang *boarding pass* maka masyarakat sudah bisa proses masuk ke dalam kapal. Tentunya dengan Ferizy, akan mempercepat proses masuknya kendaraan ke kapal sehingga masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama,” tambahnya.

Beberapa keuntungan lain dengan diaplikasikannya Ferizy ialah bisa reservasi tiket di manapun dan kapanpun, *cashless* karena pembayaran melalui aplikasi/website, serta hak atas asuransi lebih terjamin karena data lengkap, akurat dan validitasnya terjaga.

Ia berharap dengan optimalnya layanan Ferizy dapat memastikan ketersediaan tiket dan memperlancar pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan.*



Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno, didampingi Direktur TSDP Junaidi, Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana dan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspawati meninjau Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Ciwandan, Banten. 3/1/2023. Foto: HMS DJPD/MAD



Pembekalan Satuan Kerja Bidang Perhubungan Darat dengan tema “Menuju Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023 yang Akuntabel dan Berbasis Kinerja”, Jakarta, 10/1/2023. Foto: HMS DJPD/WBW



▶ Pengecekan Jalur Pansela oleh Kemenhub, Korlantas Polri, Kemen PUPR, dan Jasa Raharja, 19/1/2023. Foto: HMS DJPD/BYU



▲ Peninjauan KMP Bahtera Nusantara 3 di Pelabuhan Penyeberangan Telaga Punggur, 4/2/2023. Foto: HMS DJPD/RP



▲ Focus Group Discussion Roadmap Zero ODOL di Tangerang, Banten, 24/1/2023. Foto: HMS DJPD/BYU



▲ Dari kiri ke kanan: Ketua Forwahub M. Ichsan, Sesditjen Perhubungan Darat Amirulloh, Direktur Angkutan Jalan Suharto, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno, Direktur TSDP Junaidi pada acara Media Briefing tentang subsidi angkutan perintis Kemenhub, 7/2/2023. Foto: HMS DJPD/WBW



▲ Apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Jakarta, 30/1/2023. Pada acara tersebut diberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah terakreditasi 'A'. Foto: HMS DJPD/WBW



▶ Presiden Joko Widodo didampingi Menhub Budi Karya Sumadi serta pejabat terkait dalam Peresmian Terminal Amplas Kota Medan dan Terminal Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar, 9/2/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

▶ Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lantai 2 Terminal Tipe A Bulupitu, Purwokerto, 22/2/2023. Foto: HMS DJPD/CAS



▶ Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno bersama Korlantas Polri, KemenPUPR, Badan Pengelola Jalan Tol, dan Jasa Raharja mengecek kesiapan jalan tol Trans Jawa jelang angkutan lebaran, 23/12/2023. Foto: HMS DJPD/TLE



▶ Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2023, Jakarta, 15/3/2023. Foto: HMS DJPD/BYU



▶ Menhub Budi Karya Sumadi, didampingi Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, ketika menggelar Rapat Persiapan Angkutan Lebaran di Pelabuhan Penyeberangan Merak, 11/3/2023. Foto: HMS DJPD/MAD

